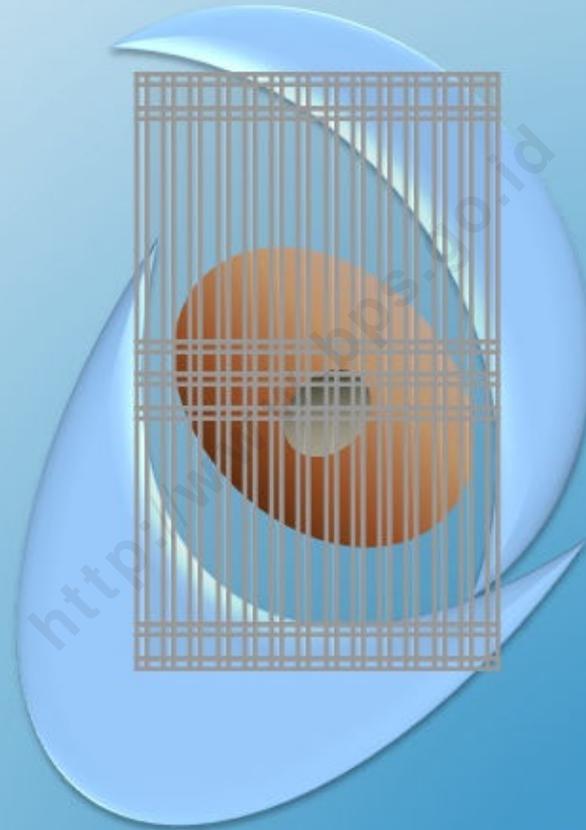


STATISTIK KRIMINAL TAHUN 2008



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK KRIMINAL TAHUN 2008

ISBN:

Nomor Publikasi :

Katalog BPS :

Ukuran Buku : 16 x 24 cm

Jumlah Halaman : xii + 74

Naskah:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Penyunting :

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<http://www.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Statistik Kriminalitas Tahun 2008 ini secara umum menyajikan informasi mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia. Publikasi ini juga dilengkapi dengan informasi mengenai kejadian konflik massal serta faktor-faktor yang menjadi pemicunya. Data yang disajikan diperoleh dari tiga sumber data, yaitu laporan registrasi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) tahun 2006 dan 2007, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007 dan Pendataan Statistik Potensi Desa (Podes) tahun 2008, yang kedua-duanya diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Data kriminalitas hasil registrasi Mabes Polri tahun 2006 dan 2007 secara konsisten menunjukkan tren kejadian tindak kriminalitas yang terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selama periode tahun 2006 – 2007, jumlah tindak kriminalitas dari sebanyak 299.168 kasus meningkat menjadi sebanyak 330.354 kasus. Pada periode yang sama, penggunaan senjata dalam aksi kriminalitas khususnya senjata api juga semakin meningkat. Aksi kejahatan yang menggunakan senjata api dari 264 kasus meningkat menjadi 292 kasus.

Data registrasi Polri juga menunjukkan makin meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminalitas atau kriminal/penjahat. Selama periode tahun 2006 – 2007, jumlah pelaku tindak kriminalitas dari sebanyak 144.592 orang meningkat menjadi sebanyak 225.465 orang. Pelaku tindak kriminalitas tersebut tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki, namun juga kaum perempuan dan mencakup orang dewasa serta anak-anak.

Seiring dengan meningkatnya jumlah tindak kriminalitas, jumlah penduduk yang menjadi korban juga terus bertambah. Data Susenas 2007 memperkirakan selama tahun 2007 sekitar 2,97 juta orang atau 1,32 persen dari seluruh populasi penduduk Indonesia menjadi korban tindak kriminalitas. Angka ini meningkat sekitar 0,5 juta orang dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Mayoritas korban adalah penduduk perdesaan (50,4 persen) dan selebihnya penduduk perkotaan (49,6 persen). Sebanyak 64,7 persen korban kriminalitas adalah laki-laki dan sebanyak 34,2 persen lainnya perempuan. Jumlah korban tersebut mencakup sebanyak 91,9 persen orang dewasa dan 8,1 persen lainnya adalah anak-anak.

Selain kejadian tindak kriminalitas, kejadian tindak kekerasan berupa konflik massal juga cenderung meningkat. Data Podes 2008, selama tahun 2008 sekitar 3,02 persen dari seluruh desa/kelurahan di Indonesia atau sekitar 2.278 desa /kelurahan masih merupakan ajang konflik massal terutama konflik antar kelompok warga.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminalitas Tahun 2008 ini merupakan publikasi ke-empat yang diterbitkan setelah era reformasi. Publikasi sebelumnya diterbitkan secara berkala setiap tahun yaitu pada tahun 2005, 2006 dan 2007. Penyusunan publikasi ini dilandasi adanya keinginan untuk menyajikan informasi tentang situasi keamanan terakhir dan perkembangannya yang bersifat nasional. Informasi serupa pernah dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik Kriminal dengan data sekunder yang diperoleh dari Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, namun karena berbagai kendala publikasi tersebut terhenti. Publikasi terakhir yang terkait dengan informasi kriminalitas adalah Statistik Kriminal 1997 dengan sumber data Lembaga Pemasyarakatan.

Data yang disajikan berasal dari tiga sumber data, yaitu laporan registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2006 dan 2007 yang diselenggarakan oleh Mabes Polri, Pendataan Statistik Potensi Desa (Podes) tahun 2008 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007 yang masing-masing diselenggarakan oleh BPS. Data registrasi Polri menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian tindak kriminalitas yang dilaporkan masyarakat atau kejadian tindak kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan. Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari keterangan Kepala Desa/Lurah, sementara data Susenas menggambarkan situasi serupa berdasarkan informasi dari rumah tangga/individu korban tindak kriminalitas. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, ketiga jenis data tersebut tidak dapat langsung dibandingkan, namun dapat saling melengkapi memberikan gambaran yang komprehensif.

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini bermanfaat terutama dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif untuk melanjutkan program-program pembangunan nasional. Kritik dan saran untuk perbaikan publikasi di masa mendatang dapat disampaikan langsung melalui Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, BPS.

Jakarta, Desember 2010
Direktur
Statistik Ketahanan Sosial

Uzair Suhaimi, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	x
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Permasalahan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup.....	5
1.5. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II. METODOLOGI	7
2.1. Jenis dan Sumber Data	7
2.2. Konsep dan Definisi	9
2.3. Penjelasan Teknis.....	12
BAB III. GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI INDONESIA.....	14
3.1. Jumlah dan Intensitas Kejadian Kriminalitas.....	15
3.2. Jenis Tindak Kriminalitas yang Menonjol.....	18
3.3. Profil Pelaku Tindak Kriminalitas	19
3.4. Profil Korban Tindak Kriminalitas.....	22
BAB IV. FENOMENA KONFLIK MASSAL	25
4.1. Potensi Konflik Massal.....	25
4.2. Insiden Konflik Massal	25
4.3. Karakteristik Konflik Massal	28
4.4. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Massal	29
4.5. Upaya Penyelesaian Konflik	32
TABEL LAMPIRAN	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1.1. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) menurut Kepolisian Daerah (Polda) Tahun 2007.....	15
Gambar 3.1. 2. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk menurut Kepolisian Daerah (Polda) Tahun 2007	16
Gambar 3.1.3. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) menurut Kepolisian Daerah (Polda) Tahun 2007.....	18
Gambar 3.2.1. Perkembangan Jenis Tindak Kriminalitas yang Menonjol, Tahun 2006-2007.....	19
Gambar 3.3.1. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Umur Tahun 2007.....	20
Gambar 3.3.2. Jumlah Pelaku Kejahatan menurut Kepolisian Daerah (Polda),Tahun 2006-2007.....	21
Gambar 3.4.1. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi, Tahun 2007.....	22
Gambar 3.4. 2. Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah.....	24
Gambar 4.2.1.. Persentase Desa/Kelurahan yang ada Kejadian Konflik Massal menurut Provinsi, Tahun 2008.....	26
Gambar 4.2.2. Banyaknya Kejadian Konflik Massal menurut Provinsi, Tahun 2008.....	27
Gambar 4.3.1. Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami Konflik Massal menurut Jenis Konflik Massal, Tahun 2008	28
Gambar 4.4.1. Persentase Penyebab Utama Konflik Massal, Tahun 2008.....	29
Gambar 4.4.2. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Konflik Massal menurut Jenis dan Penyebab Utama, Tahun 2008	30
Gambar 4.5.1. Persentase Penyelesaian Konflik menurut Jenis Konflik yang Paling Sering Terjadi	32
Gambar 4.5.2. Persentase Penyelesaian Konflik menurut Provinsi, Tahun 2008	33
Gambar 4.5.3. Cara Penyelesaian dan Isinator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Konflik Tahun 2008	35

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Tindak Pidana (<i>Crime Total</i>) menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2005-2007	407
Tabel 2 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2005-2007.....	42
Tabel 3 Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2005-2007.....	43
Tabel 4 Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 penduduk menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2005-2007.....	44
Tabel 5 Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia menurut Kepolisian Daerah, 2007.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6 Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang) menurut Kepolisian Daerah, 2007.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7 WNI yang Terlibat Perkara Pidana menurut Kepolisian Daerah dan Jenis Kelamin, 2007	46
Tabel 8 WNA yang Terlibat Perkara Pidana menurut Kepolisian Daerah dan Jenis Kelamin, 2007	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9 Pelaku Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah, Kewarganegaraan, dan Jenis Kelamin, 2007	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10 Persentase Penduduk yang Pernah menjadi Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah.....	51
Tabel 11 Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah.....	52
Tabel 12 Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin	53
Tabel 13 Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Kelompok Usia.....	54
Tabel 14 Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Jenis Tindak Kejahatan	57
Tabel 15 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Kejadian Konflik Massal Tahun 2008	58
Tabel 16 Banyaknya Kejadian Konflik Massal Selama Tahun 2008 Menurut Provinsi dan Jenis Konflik.....	59
Tabel 17 Persentase Desa/Kelurahan menurut Provinsi dan Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Tahun 2008.....	61
Tabel 18 Jumlah dan Persentase Kejadian Konflik Massal Menurut Provinsi dan Penyebab Utama Selama Tahun 2008	63
Tabel 19 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Konflik	65
Tabel 20 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Konflik	66

Tabel 21	Persentase Desa/Kelurahan yang Dapat Menyelesaikan Konflik Menurut Provinsi dan Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi.....	67
Tabel 22	Persentase dan Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami	69
Tabel 23	Persentase Desa/Kelurahan menurut Provinsi dan Inisiator.....	70
Tabel 24	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi, Cara Penyelesaian Konflik dan Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Konflik.....	72
Tabel 25	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Konflik Menurut Provinsi, Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi dan Hasil Penyelesaian	73

<http://www.bps.go.id>

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis serta kebutuhan sosialnya, maka hidupnya akan merasa tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini tidak ada gunanya. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologisnya semata, namun juga kebutuhan sosialnya, termasuk kebutuhan akan rasa aman.

Selain merupakan kebutuhan sosial, rasa aman (*security*) juga merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, sehingga sulit diukur. Untuk itu, rasa aman masyarakat biasanya diukur dari sisi yang berlawanan, yaitu dari banyaknya kejadian yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan ketakutan. Kejadian tersebut dalam konteks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) disebut gangguan kamtibmas. Polri mengklasifikasikan gangguan kamtibmas ke dalam dua kelompok, yaitu kejadian pidana atau kriminalitas, seperti pencurian, penipuan, dan kejadian bukan pidana, antara lain kerusuhan dan konflik massal.

Gangguan kamtibmas apapun bentuknya dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi bahkan psikologis bagi masyarakat. Akibat tindak kriminalitas, rumah tangga harus mengeluarkan biaya ekstra, antara lain untuk berobat, rehabilitasi korban yang tekanan mental, mengganti barang yang rusak atau hilang dicuri. Aksi kriminalitas juga dapat mengakibatkan suatu keluarga kehilangan anggota keluarganya yang tewas dibunuh.

Gangguan kamtibmas tidak hanya berdampak pada penduduk atau masyarakat di suatu wilayah, namun juga berdampak pada perkembangan kesejahteraan wilayah yang bersangkutan. Wilayah-wilayah yang rawan gangguan kamtibmas pada gilirannya akan menjadi wilayah yang miskin. Pada satu pihak, para pengusaha dan investor akan membatalkan niatnya untuk berusaha dan menanam investasi di wilayah tersebut. Di lain pihak, para pengusaha dan investor yang telah berusaha di wilayah tersebut akan segera memindahkan usahanya ke wilayah lain yang dianggap lebih aman.

1.2. Gambaran Umum Keamanan

Selama lima tahun terakhir, situasi dan kondisi keamanan masyarakat di Indonesia memperlihatkan gambaran yang semakin memprihatinkan. Jumlah kejadian tindak kejahatan /kriminalitas semakin meningkat secara signifikan. Berdasarkan data registrasi Polri, jumlah kejadian kriminalitas dari sebanyak 196.931 kasus pada tahun 2003 meningkat menjadi sebanyak 299.163 kejadian pada tahun 2006. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa penggunaan senjata api dalam aksi kejahatan selama periode yang sama juga meningkat dari sebanyak 242 kasus menjadi sebanyak 292 kasus.

Angka-angka di atas masih lebih rendah dari jumlah kejadian kriminalitas yang sebenarnya terjadi pada masyarakat. Laporan Polri masih terbatas pada kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat atau kejadian kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh pihak kepolisian. Sebagian besar masyarakat yang menjadi korban tindak kriminalitas karena berbagai alasan masih enggan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Mardjono (1993) mengungkapkan bahwa kejadian tindak kriminalitas yg tidak dilaporkan masyarakat dan tidak tercatat (*the dark number of crime*) jumlahnya cukup besar, termasuk di antaranya adalah kejahatan korporasi (*Corporate Crime*) dan kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*).

Angka kriminalitas yang lebih rendah dari keadaan yang sebenarnya ini juga nampak sangat kontradiktif dengan angka jumlah korban tindak kriminalitas yang cukup tinggi. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkapkan bahwa selama tahun 2007 jumlah korban tindak kriminalitas di Indonesia mencapai sekitar 1,32 persen dari seluruh populasi penduduk Indonesia atau sekitar 2,97 juta orang (BPS, 2007). Jika diasumsikan bahwa setiap penduduk mengalami tindak kriminalitas secara sendiri-sendiri atau independen, diperkirakan terdapat kejadian tindak kriminalitas maksimum sebanyak 2,97 juta kejadian.

Situasi keamanan di Indonesia selama lima tahun terakhir juga masih terus diwarnai dengan kejadian konflik massal terutama berupa perkelahian antar kelompok warga yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Data Statistik Potensi Desa (Podes) tahun 2005 menunjukkan bahwa selama tahun 2005 telah terjadi konflik massal berupa perkelahian antar kelompok warga di sebanyak 1.243 desa/kelurahan atau sekitar 1,8 persen dari jumlah seluruh desa/kelurahan (BPS, 2006). Pada tahun 2008, konflik massal berupa perkelahian antar kelompok warga masih terjadi di sebanyak 2.278 desa/kelurahan atau sekitar 3,0 persen dari sebanyak 75.378 desa/kelurahan. Keseluruhan kejadian konflik tersebut mengakibatkan sebanyak 631 orang meninggal, sebanyak 7.315 menderita luka-luka dan kerugian materil sekitar Rp.15 306 juta (BPS, 2006).

Meningkatnya jumlah kejadian tindak kejahatan/kriminalitas dan masih terjadinya konflik massal di beberapa wilayah di Indonesia merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Gangguan kamtibmas tersebut pada level tertentu akan berdampak pada perkembangan perekonomian negara Indonesia secara keseluruhan. Akibat terjadinya konflik massal di beberapa wilayah, pemerintah harus mengeluarkan dana dan biaya yang cukup besar, antara lain untuk membantu penduduk yang terpaksa mengungsi, membangun kembali fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan sebagainya serta rumah tempat tinggal penduduk yang hancur/terbakar pada saat konflik dan membiayai operasi militer untuk memulihkan keamanan.

Angka kriminalitas maupun konflik massal pada level tertentu juga akan dapat menurunkan citra dan kredibilitas pemerintah di mata internasional. Dunia internasional akan menganggap bahwa negara Indonesia tidak aman. Hal ini akan mengakibatkan makin menurunnya kegiatan-kegiatan di beberapa sektor perekonomian potensial, seperti sektor penanaman modal asing dan sektor pariwisata. Hal ini terbukti dari kejadian teror bom di Legian, provinsi Bali pada tahun 2002 yang mengakibatkan merosotnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, khususnya pulau Bali.

Upaya untuk mengatasi gangguan kamtibmas di wilayah Indonesia bukan hal yang mudah mengingat wilayah Indonesia sangat luas dan merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Wilayah Indonesia juga merupakan kombinasi antara wilayah perairan dengan wilayah daratan yang berupa daerah pegunungan. Dengan kondisi geografis demikian, sebagian wilayah di Indonesia hingga saat ini masih sulit untuk dijangkau dengan transportasi umum.

Di lain pihak, jumlah petugas polisi yang masih sangat terbatas merupakan suatu kendala tersendiri. Data Polri menunjukkan bahwa selama tahun 2000 – 2005, rasio polisi dengan penduduk mencapai sebesar 1 : 700, yang artinya setiap polisi harus melayani sebanyak 700 orang penduduk. Angka ini masih jauh lebih buruk dari angka ideal yang ditetapkan PBB, yaitu sebesar 1 : 400. Sebagai perbandingan, angka rasio polisi dan penduduk di Brunei adalah sebesar 1 : 200, Singapura 1 : 250 dan Jepang 1 : 400.

Sebagian besar sosiolog menyatakan bahwa kejadian kriminalitas, konflik massal, kerusuhan dan sebagainya merupakan bentuk dari masalah sosial atau penyakit sosial yang umum ditemukan di masyarakat. Sebagaimana halnya suatu penyakit, upaya pencegahan atau preventif akan lebih efektif dibandingkan dengan upaya untuk memusnahkannya. Namun demikian, upaya ini hanya akan berhasil jika didukung oleh perencanaan yang cermat yang ditunjang oleh tersedianya data statistik yang akurat, mutakhir dan berkesinambungan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Kriminal Tahun 2008 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas dan konflik massal yang terjadi di wilayah Indonesia.

Karakteristik tindak kriminalitas yang dilihat antara lain meliputi jenis tindak kriminalitas, jumlah kejadian serta perkembangannya, jenis dan jumlah kerugian yang diakibatkan, karakteristik pelaku tindak kriminalitas, korban tindak kriminalitas dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Sedangkan karakteristik kejadian konflik massal akan dilihat dari aspek wilayah yang merupakan lokasi konflik massal, jenis dan sifat konflik, faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik dan langkah antisipasi serta penyelesaiannya.

1.4. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas dan kejadian konflik massal yang terjadi di Indonesia, perbandingan serta disparitas antar provinsi dan perkembangannya antar waktu. Konflik massal yang dicakup dalam publikasi adalah konflik yang melibatkan dua atau lebih kelompok massa, baik yang tinggal bersama di satu wilayah, maupun yang tinggal di wilayah yang berlainan yang disertai dengan perkelahian/konflik fisik, baik dengan atau tanpa menggunakan senjata.

Desa/kelurahan yang menjadi lokasi kejadian konflik massal merupakan desa/kelurahan yang benar-benar menjadi tempat atau arena terjadinya konflik massal tanpa memperhatikan apakah para pelakunya adalah warga desa/kelurahan tersebut atau warga desa/kelurahan lain.

1.5. Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Pada bagian pertama (Bab I) dijelaskan beberapa aspek penting yang melatar belakangi penyusunan publikasi ini. Pada bagian kedua (Bab II) diuraikan mengenai metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini yang meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis mengenai statistik/indikator yang disajikan. Bagian ketiga (Bab III) menyajikan gambaran umum kriminalitas di Indonesia, meliputi jenis dan jumlah kejadian kriminalitas serta perkembangannya, jenis dan jumlah kerugian, karakteristik pelaku maupun korban tindak kriminalitas dan upaya masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Bagian keempat (Bab IV) yang merupakan bagian terakhir menyajikan gambaran tentang konflik massal di wilayah desa/kelurahan, jenis dan sifat konflik, faktor penyebab dan cara penyelesaiannya.

BAB II. METODOLOGI

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan terdiri dari tiga jenis data yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

- (1). Data jumlah dan karakteristik kejadian serta pelaku tindak kejahatan/kriminalitas. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2006 dan 2007, Mabes Polri. .
- (2). Data jumlah dan karakteristik korban tindak kejahatan/kriminalitas. Data ini diolah langsung dari raw data Susenas tahun 2007.
- (3). Data jenis dan jumlah kejadian konflik massal. Data ini diolah langsung dari raw data PODES tahun 2008.

Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2006 dan 2007

Laporan Evaluasi Situasi Kamtibmas merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang menyajikan gambaran mengenai jenis dan jumlah gangguan kamtibmas yang mencakup kejadian pidana/kriminalitas dan kejadian bukan pidana, seperti kerusuhan/konflik massal. Laporan ini menyajikan data pada level nasional dan provinsi. Data kriminalitas yang disajikan meliputi jumlah dan karakteristik kejadian tindak kriminalitas, pelaku dan kerugian yang diderita.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban tindak kriminalitas.

Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 250,000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat, namun demikian cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan, Modul Pendidikan dan sebagainya. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 65.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan, yaitu pada tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi data jenis dan frekuensi tindak kriminalitas, pelaku tindak kriminalitas, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, kerugian yang diderita. Namun karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

Statistik Potensi Desa (Podes) 2008

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan nara sumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluh pertanian (PPL) dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan

struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja dan tempat ibadat lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, super market, KUD, sarana transportasi, Bank dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian tindak kriminalitas dan konflik massal, baik antar warga desa maupun antar desa.

2.2. Konsep dan Definisi

A. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

- a. *Peristiwa yang dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- b. *Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian*, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Tindak Kriminalitas

- a. *Pelaku tindak kriminalitas* adalah:
 - Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
 - Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.
- b. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :
 - Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.

- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan

Tindak kejahatan yang dimaksud dalam survey ini (Susenas dan Podes) adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP, sebatas yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya pembunuhan, penganiayaan, penculikan atau perampasan kemerdekaan, pencurian dengan atau tanpa kekerasan, pembakaran, perusakan, penggelapan, penipuan, perkosaan, penghinaan, narkoba, penjualan anak, dan pencemaran nama baik. Dalam survey ini yang dicatat adalah korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan.

Suatu rumahtangga yang menjadi penyelenggara perjudian atau menjadi pengedar narkoba belum tentu menjadi korban kejahatan, kecuali bila ada anggota rumah tangga yang menjadi korban akibat ada rumahtangga lain yang menjadi penjudi atau pematat.

F. Jenis Kejahatan

Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perampokan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri atau jika

perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan direncanakan atau pun tanpa rencana.

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Perkosaan adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, Korban perbuatan santet, guna-guna atau jimat-jimat dalam survey ini tidak termasuk sebagai korban kejahatan.

Penjarahan adalah pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain, mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban, luka/cacat, atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara sempurna.

Pembakaran adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu, misalnya rumah, mobil dan kapal, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan orang lain.

Penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba untuk kesenangan.

Peredaran gelap narkoba adalah perbuatan menjual narkoba dengan imbalan berupa uang atau barang.

Perdagangan anak/perempuan (*trafficking*) adalah upaya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya meliputi eksploitasi lewat memprostitusikan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau

pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Lainnya yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di atas.

G. Perkelahian Massal

Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga di luar desa/kelurahan/nagari (desa/kelurahan/nagari lainnya).

Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.

Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.

Perkelahian antar pelajar atau mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.

Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan dan sebagainya.

2.3. Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana :

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

3. **Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)**

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun t}} \times (\text{detik})$$

4. **Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)**

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

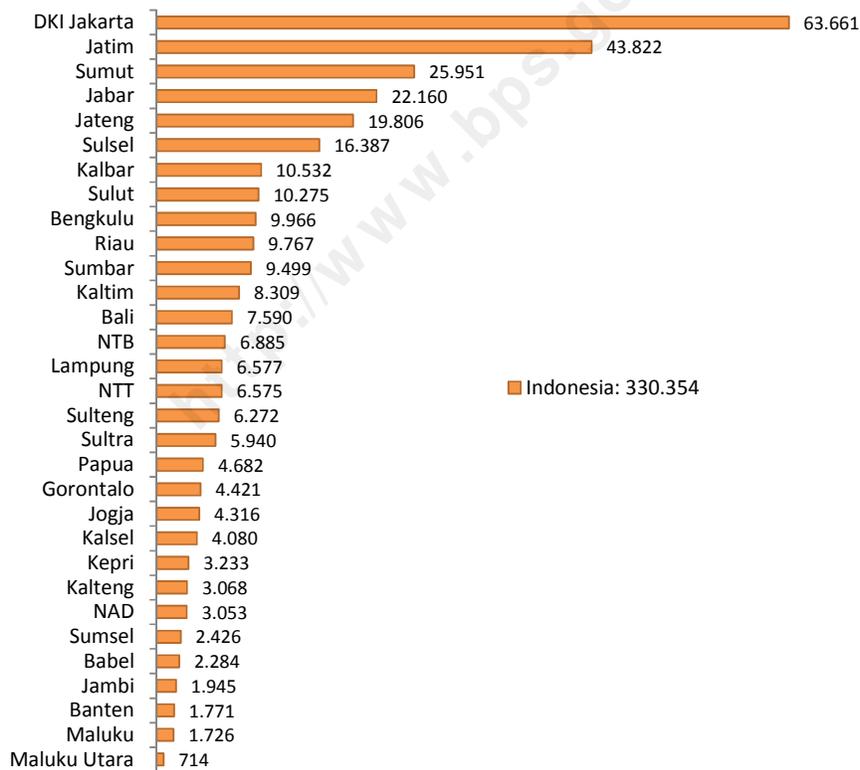
<http://www.bps.go.id>

BAB III. GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI INDONESIA

3.1. Tingkat dan Perkembangan Kriminalitas

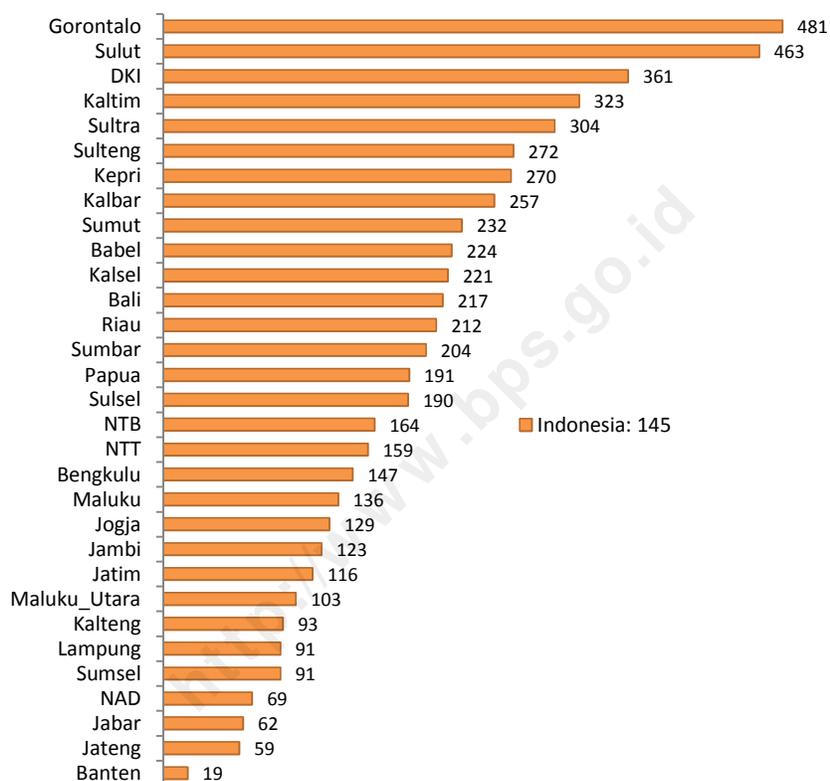
Berdasarkan laporan tahunan Mabes Polri, jumlah kejadian tindak kriminalitas atau *crime total* di Indonesia selama tahun 2007 mencapai sebanyak 330.354 kejadian. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.1.1, selama periode tersebut DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah masih merupakan lima provinsi yang paling rawan kejadian tindak kriminalitas. Angka jumlah kejadian tindak kriminalitas atau *crime total* pada tahun 2007 untuk ke-lima provinsi tersebut pada tahun 2007 berturut-turut mencapai sebesar 63,661; 43.822; 25.951; 22.160 dan 19.806. Sebaliknya, lima provinsi yang memiliki angka *crime total* paling rendah selama tahun 2007 secara berturut-turut adalah Maluku Utara(714), Maluku (1.726), Banten (1.771), Jambi (1.945) dan Bangka Belitung (2.284).

Gambar 3.1.1.
Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) menurut Kepolisian Daerah (Polda)
Tahun 2007



Selama tiga tahun terakhir, angka kriminalitas di Indonesia secara konsisten terus meningkat. Angka kriminal total dari sebesar 256.431 pada tahun 2005, meningkat menjadi sebesar 299.168 dan 330.354 pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan tersebut terjadi secara menyeluruh di semua provinsi, kecuali provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Papua yang masing-masing mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan (lihat Tabel 1).

Gambar 3.1.2.
Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk menurut Kepolisian Daerah (Polda) Tahun 2007



Angka *crime rate* di Indonesia pada tahun 2007 mencapai sebesar 145 per 100.000 penduduk yang berarti bahwa dari setiap 100.000 orang penduduk di Indonesia, sebanyak 145 orang di antaranya mempunyai resiko terkena tindak kriminalitas. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.2, angka *crime rate* untuk masing-masing provinsi selama tahun 2007 sangat bervariasi dengan nilai range yang berkisar antara 19 – 481 per 100.000 penduduk.

Selama tahun 2007, lima provinsi yang memiliki angka *crime rate* paling tinggi berturut-turut adalah provinsi Gorontalo (481), Sulawesi Utara (463), DKI Jakarta (361), Kalimantan Timur (323) dan Sulawesi Tenggara (304). Sebaliknya, provinsi yang memiliki angka *crime rate* paling rendah berturut-turut adalah provinsi Banten (19), Jawa Tengah (59), Jawa Barat (62), NAD (69) dan Sumatera Selatan (91).

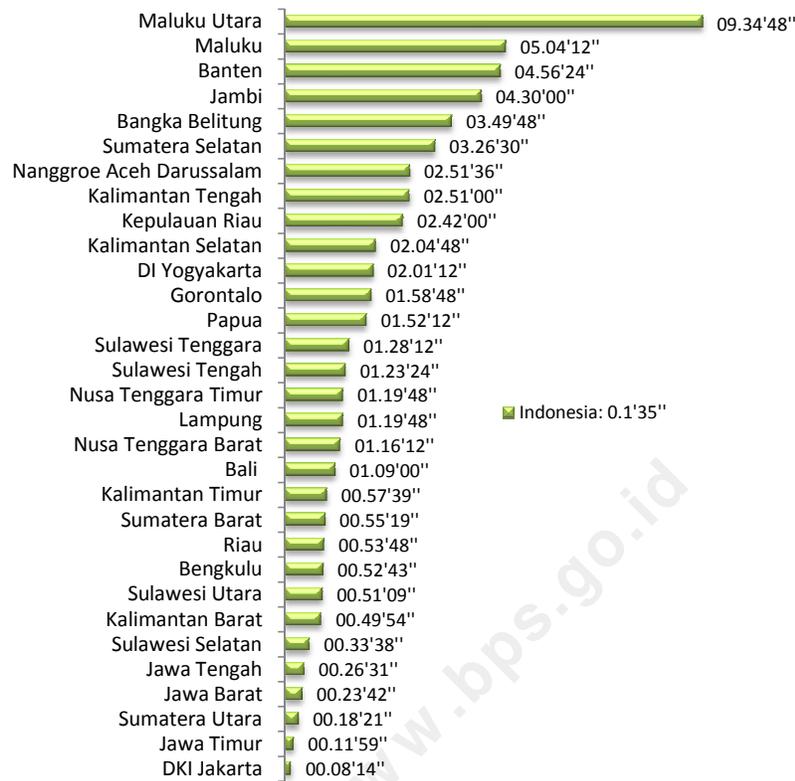
Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian tindak kriminalitas, angka *crime rate* juga terus meningkat. Pada tahun 2005, angka *crime rate* secara nasional mencapai sebesar 121 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2006 dan 2007, angka tersebut meningkat menjadi sebesar 131 dan 145 per 100.000 penduduk. Peningkatan angka *crime rate* selama periode tahun 2005 – 2007 tersebut terlihat secara umum di seluruh provinsi, kecuali provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah dan Papua (lihat Tabel 4).

Salah satu aspek penting dari peristiwa tindak kriminalitas adalah intensitas kejadian tindak kriminalitas yang biasa diukur dengan menggunakan indikator *crime clock*. Indikator ini menunjukkan selang waktu atau interval waktu antara satu kejadian tindak kriminalitas dengan kejadian berikutnya. *Crime clock* sebesar dua jam menunjukkan bahwa setiap selang waktu dua jam terjadi satu peristiwa tindak kriminalitas.

Seperti yang disajikan pada Gambar 3.1.3, angka *crime clock* nasional pada tahun 2007 adalah sebesar 0.1'35" yang berarti bahwa setiap kurang dari dua menit, di wilayah negara Indonesia terjadi satu peristiwa tindak kriminalitas. Angka *crime clock* untuk masing-masing provinsi sangat bervariasi dengan nilai berkisar antara 00.8'33" – 12.22'12". Provinsi yang memiliki angka *crime clock* paling kecil atau paling sering mengalami kejadian tindak kriminalitas selama tahun 2007 berturut-turut adalah provinsi DKI Jakarta (00.8'14"), Jawa Timur (00.11'59"), Sumatera Utara (00.18'21") dan Jawa Barat (00.22'42"). Sebaliknya, provinsi yang memiliki angka *crime clock* paling tinggi berturut-turut adalah provinsi Maluku Utara (09.34'48"), Maluku (05.04'12"), Banten (04.56'24") dan Jambi (4.30'00").

Angka *crime clock* merupakan indikator negatif yang nilainya akan semakin rendah jika kejadian tindak kriminalitas semakin meningkat. Selama tahun 2005 – 2007, sejalan dengan meningkatnya angka *crime total*, angka *crime clock* semakin kecil (lihat Tabel 3). Semakin banyak kejadian kejahatan berarti semakin sering kejadian tersebut muncul.

Gambar 3.1.3.
Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) menurut Kepolisian Daerah (Polda) Tahun 2007



3.2. Jenis Tindak Kriminalitas yang Menonjol

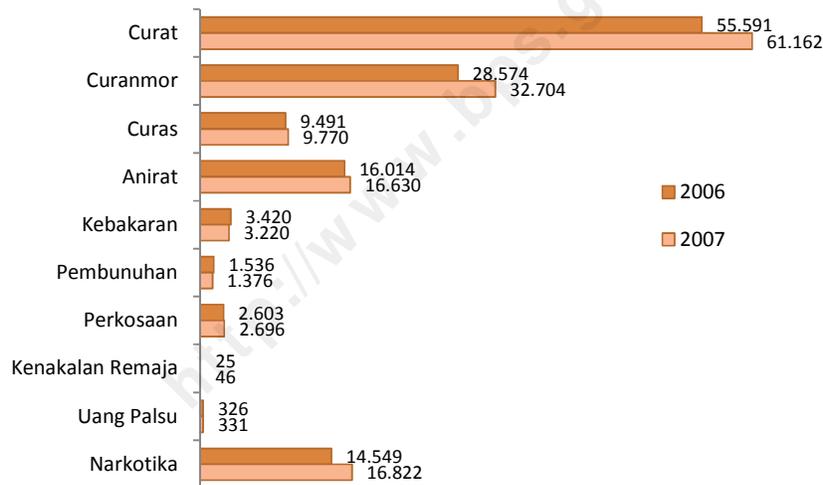
Peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan skala prioritas penanganannya, Polri mengidentifikasi sepuluh jenis tindak kriminalitas sebagai *jenis tindak kriminalitas yang menonjol*, yang meliputi: pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), penganiayaan berat (anirat), kebakaran, pembunuhan, perkosaan, kenakalan remaja, pemalsuan uang, dan narkoba.

Seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.1, jumlah kasus untuk jenis tindak kriminalitas yang tergolong pada kelompok tindak kriminalitas yang menonjol selama tahun 2007 masih nampak signifikan. Jenis dan jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2007 untuk

kelompok tersebut berturut-turut adalah pencurian dengan pemberatan (61.162), pencurian kendaraan bermotor (32.704), pencurian dengan kekerasan (9.770), penganiayaan berat (16.630), kebakaran (3.220), pembunuhan (1.376), perkosaan (2.696), kenakalan remaja (46), uang palsu (331) dan narkoba (16.822). Jumlah keseluruhan tindak pidana menonjol tersebut adalah 144.757 atau 43,82 persen dari *crime total*.

Gambar 3.2.1 juga menunjukkan bahwa komposisi sepuluh jenis tindak kriminalitas yang menonjol selama periode tahun 2006 – 2007 tidak mengalami perubahan yang berarti, kecuali pergeseran peringkat jumlah kasusnya. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.1, tindak kriminalitas narkoba yang menempati peringkat ke empat pada tahun 2006, naik menjadi peringkat ke tiga pada tahun 2007. Sebaliknya, tindak kriminalitas penganiayaan berat dari peringkat ketiga turun menjadi peringkat ke empat. Dari Gambar 3.2.1 juga terlihat bahwa selama tahun 2006–2007 terjadi peningkatan jumlah kejadian/kasus untuk semua jenis tindak kriminalitas yang menonjol, kecuali tindak kriminalitas kebakaran dan pembunuhan.

Gambar 3.2.1.
Perkembangan Jenis Tindak Kriminalitas yang Menonjol, Tahun 2006-2007

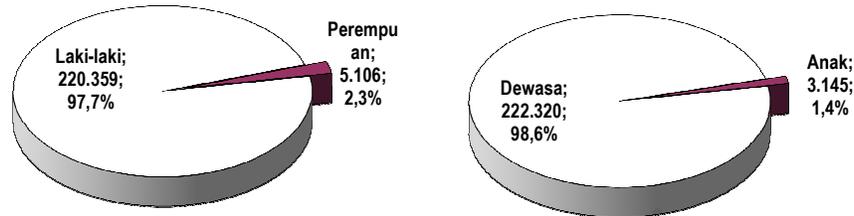


3.3. Pelaku Tindak Kriminalitas

Berdasarkan laporan registrasi Mabes Polri, aksi tindak kriminalitas yang terjadi selama tahun 2007 dilakukan oleh sebanyak 225.465 orang pelaku tindak kriminalitas atau penjahat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 141 orang pelaku atau sekitar 0,06 persen adalah

warga negara asing (WNA). Aksi tindak kriminalitas yang dilakukan WNA selama tahun 2007 hanya terjadi di delapan provinsi, yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku. Jumlah WNA pelaku kriminalitas pada setiap provinsi berkisar antara 1 – 4 orang, kecuali di Jawa Timur (71 orang), Sumatera Utara (44 orang), dan Yogyakarta (9 orang) (lihat Tabel 9).

Gambar 3.3.1.
Pelaku Tindak Kejahatan menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Umur Tahun 2007



Komposisi pelaku seperti yang disajikan pada Gambar 3.3.1 menunjukkan bahwa mayoritas atau sekitar 98,0 persen dari keseluruhan pelaku tindak kriminalitas tersebut adalah laki-laki dan sekitar 2,0 persen lainnya perempuan. Sekitar 98,6 persen pelaku kriminalitas adalah orang dewasa (berusia 16 tahun atau lebih) dan sekitar 1,4 persen lainnya adalah anak-anak (berusia kurang dari 16 tahun).

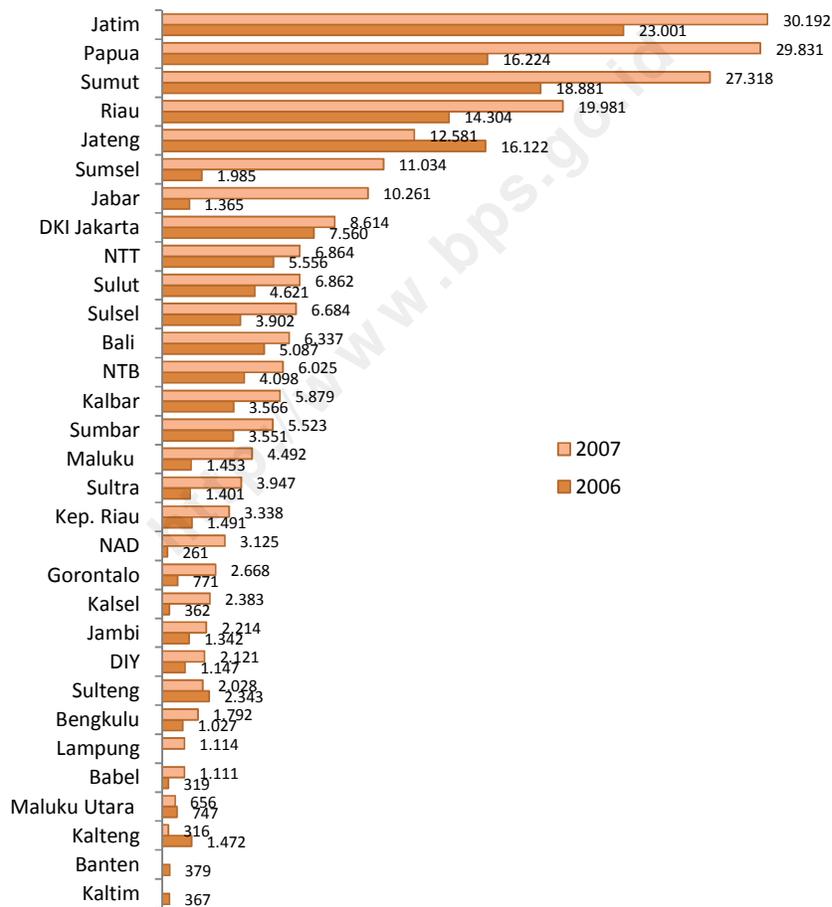
Sebaran jumlah pelaku tindak kriminalitas menurut masing-masing provinsi selama tahun 2007 nampak sangat bervariasi dengan kisaran antara 174 – 30.121 orang. Seperti yang disajikan pada Tabel 9, provinsi-provinsi yang memiliki angka jumlah pelaku tindak kriminalitas/penjahat paling tinggi selama tahun 2007 secara berturut-turut adalah provinsi Jawa Timur (30.121), Papua (29.831), Sumatera Utara (27.274), Riau (19.981) dan Jawa Tengah (12.581). Sebaliknya, provinsi yang memiliki angka jumlah penjahat paling rendah secara berturut-turut adalah provinsi Banten (174), Kalimantan Selatan (316), Maluku Utara (656), Bangka Belitung (1.111) dan Lampung (1.114).

Seiring dengan meningkatnya jumlah kejadian/kasus tindak kriminalitas, jumlah penjahat atau pelaku tindak kriminalitas juga makin meningkat. Berdasarkan laporan Mabes Polri, jumlah pelaku tindak kriminalitas pada tahun 2006 tercatat sebanyak 144.665 orang, sementara pada tahun 2007 mencapai sebanyak 225.465 orang. Hal ini menunjukkan bahwa

selama periode tahun 2006 – 2007, jumlah penjahat bertambah sebanyak 80.800 orang atau sekitar 55,85 persen.

Meningkatnya angka jumlah pelaku tindak kriminalitas secara nasional selama periode tahun 2006 – 2007 nampak sangat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminalitas di sejumlah provinsi. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.3.2, selama tahun 2006 – 2007 terjadi peningkatan jumlah pelaku tindak kriminalitas terjadi pada setiap provinsi, kecuali di provinsi Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Selama periode tahun 2006 – 2007, pelaku tindak kriminalitas di enam provinsi tersebut walaupun tidak secara signifikan namun jumlahnya cenderung semakin berkurang.

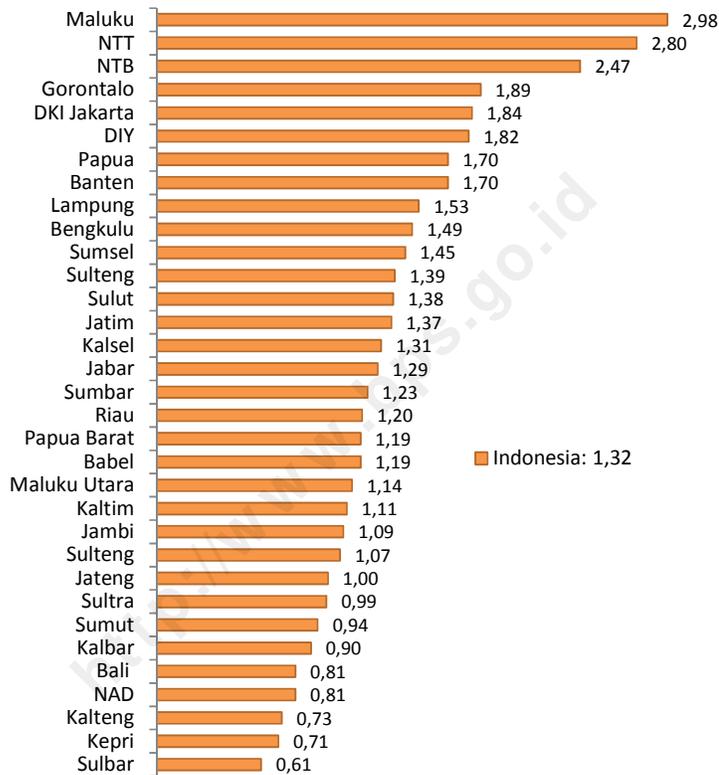
Gambar 3.3.2.
Jumlah Pelaku Kejahatan menurut Kepolisian Daerah (Polda), Tahun 2006-2007



3.4. Profil Korban Tindak Kriminalitas

Berdasarkan data Susenas terungkap bahwa selama tahun 2007 sekitar 1,32 persen dari seluruh populasi penduduk Indonesia atau sekitar 2,97 juta orang telah menjadi korban tindak kriminalitas. Populasi penduduk yang menjadi korban tindak kriminalitas tersebut tersebar di berbagai provinsi, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan (lihat Tabel 10).

Gambar 3.4.1.
Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi, Tahun 2007



Seperti yang disajikan pada Gambar 3.4.1, persentase penduduk yang menjadi korban tindak kriminalitas pada masing-masing provinsi nampak sangat bervariasi dengan nilai persentase berkisar antara 0,61 – 2,98 persen. Angka persentase penduduk korban tindak kriminalitas yang paling tinggi tercatat di provinsi Maluku (2,98 persen), Nusa Tenggara Timur (2,8 persen), Nusa Tenggara Barat (2,47 persen), Gorontalo (1,89 persen) dan DKI Jakarta (1,84 persen). Sebaliknya, provinsi yang memiliki angka persentase korban tindak

kriminalitas yang paling rendah berturut-turut adalah provinsi Sulawesi Barat (0,61 persen), Kepulauan Riau (0,71 persen), Kalimantan Tengah (0,73 persen), Nanggroe Aceh Darussalam (0,81 persen) dan Bali (0,81 persen).

Gambar 3.4.1 juga menunjukkan bahwa sebanyak 14 provinsi atau sekitar 42,4 persen dari jumlah seluruh provinsi mempunyai angka persentase korban kriminalitas lebih tinggi dari angka nasional atau lebih tinggi dari 1,32 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak empat provinsi atau sekitar 28,6 persen terkonsentrasi di pulau Jawa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur.

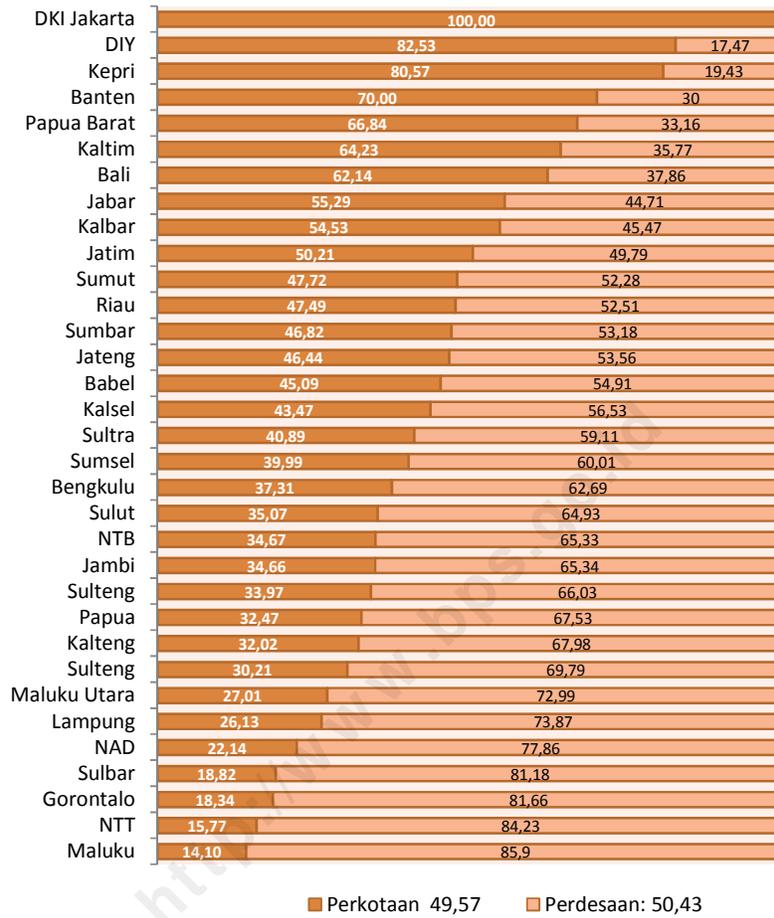
Penduduk yang menjadi korban tindak kriminalitas pada umumnya adalah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dengan persentase sebesar 50,43 persen, sedangkan sebesar 49,57 persen lainnya adalah penduduk perkotaan. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.4.2, kecenderungan yang serupa secara umum juga terlihat pada masing-masing provinsi, kecuali di DKI Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Banten, Papua Barat, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Di sepuluh provinsi tersebut, angka persentase penduduk korban tindak kriminalitas pada daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah perdesaan.

Penduduk yang menjadi korban tindak kriminalitas mayoritas adalah laki-laki dengan persentase mencapai sebesar 64,74 persen dan sebesar 34,15 persen lainnya adalah perempuan. Komposisi berdasarkan gender dari keseluruhan populasi penduduk korban tindak kriminalitas yang serupa juga ditemukan secara umum di semua provinsi. Namun demikian pada sebanyak empat provinsi yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara dan Maluku, penduduk perempuan yang menjadi korban tindak kriminalitas proporsinya mencapai lebih dari 40 persen (lihat Tabel 12).

Struktur umur dari penduduk korban kriminalitas menunjukkan bahwa mayoritas korban atau sekitar 91,9 persen adalah penduduk dewasa atau penduduk yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sedangkan sebesar 7 persen lainnya adalah anak-anak yang masih berusia kurang dari 17 tahun. Struktur umur dari keseluruhan populasi penduduk yang menjadi korban tindak kriminalitas yang serupa juga ditemukan secara umum di masing-masing provinsi. Persentase anak-anak yang menjadi korban tindak di setiap provinsi secara umum hanya berkisar antara 3 hingga 10 persen, kecuali di provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku. Anak-anak yang menjadi

korban tindak kriminalitas di ke-enam provinsi tersebut, proporsinya mencapai lebih dari 13,0 persen (lihat Tabel 13a).

Gambar 3.4. 2.
Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah



BAB IV. FENOMENA KONFLIK MASSAL

4.1. Potensi Konflik Massal

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan budaya. Kemajemukan bangsa Indonesia terjalin menjadi satu ikatan bangsa yang besar dengan Pancasila sebagai falsafah negara yang sekaligus sebagai alat pemersatu. Ikatan persatuan ini secara eksplisit tercantum dalam lambang negara Garuda Pancasila yang bertuliskan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Semboyan ini secara harfiah mempunyai arti berbeda-beda (suku bangsa, agama dan budaya) tetapi tetap satu (bangsa Indonesia).

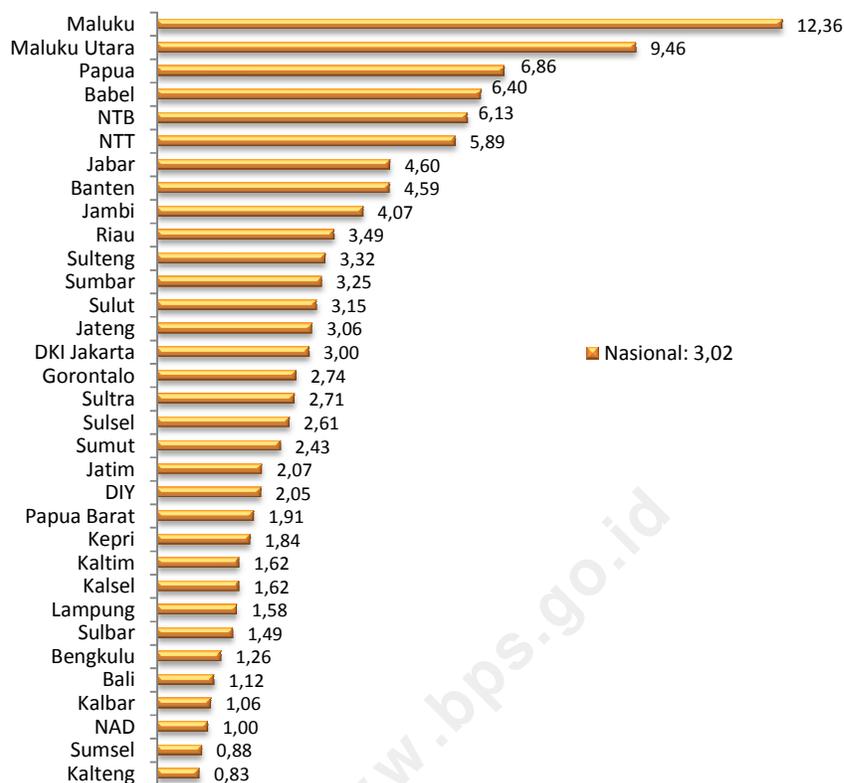
Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia yang menjadi "trade mark" di mata dunia internasional. Walaupun demikian, kemajemukan bangsa Indonesia di lain pihak juga merupakan salah satu potensi pemicu terjadinya konflik massal secara internal di beberapa daerah di wilayah negara Indonesia. Konflik massal yang terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (1999) dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (2000) dipicu oleh masalah pertikaian antar etnis (suku bangsa), sementara konflik massal yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (1998) dan Kota Ambon, Maluku (1999) dipicu oleh isu perbedaan agama.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa keutuhan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang majemuk dihadapkan pada potensi perpecahan yang justru bersumber dari kemajemukan itu sendiri. Potensi tersebut mencakup tiga faktor yang disebut sebagai SARA, yaitu Suku, Agama dan Ras. Kenyataan secara empiris menunjukkan bahwa seringkali konflik-konflik massal karena kepentingan tertentu (*conflict of interest*) yang terjadi di suatu wilayah diissukan sebagai konflik SARA sehingga cakupan konflik tersebut semakin meluas.

4.2. Insiden Konflik Massal

Selama tahun 2008 terjadi konflik massal di sebanyak 2.278 desa/kelurahan atau sekitar 3,02 persen dari sebanyak 75.378 desa /kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2005 insiden tersebut hanya terjadi di sebanyak 1.610 desa/kelurahan atau sekitar 2,30 persen dari populasi sebanyak 69.957 desa/kelurahan (BPS,2005). Ini berarti bahwa selama kurun waktu tiga tahun, jumlah desa/kelurahan yang mengalami insiden konflik massal bertambah sebanyak 1.268 desa/kelurahan.

Gambar 4.2.1..
Persentase Desa/Kelurahan yang ada Kejadian Konflik Massal menurut Provinsi, Tahun 2008

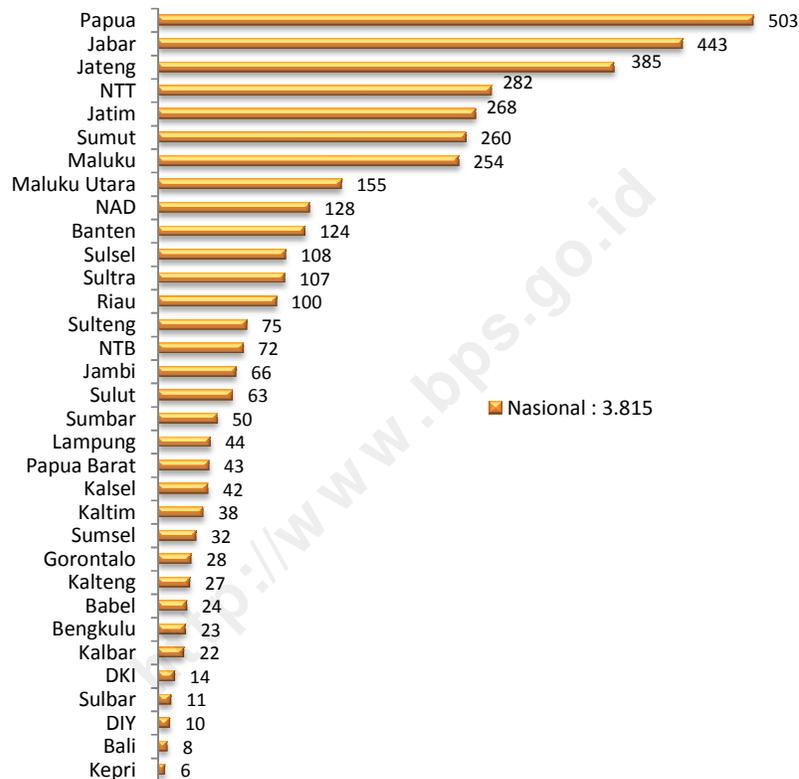


Seperti yang terlihat pada Gambar 4.2.1, proporsi banyaknya desa/kelurahan yang mengalami insiden konflik massal di setiap provinsi selama tahun 2008 nampak cukup bervariasi dengan persentase berkisar antara 0,83 – 12,36 persen. Angka persentase paling tinggi berturut-turut ditemukan di provinsi Maluku (12,36 persen), Maluku Utara (9,46 persen), Papua (6,86 persen), Bangka Belitung (6,40 persen) dan Nusa Tenggara Barat (6,13 persen). Sebaliknya, angka paling rendah ditemukan di provinsi Kalimantan Tengah (0,83 persen), Sumatera Selatan (0,88 persen) dan Nanggroe Aceh Darussalam (1,00 persen).

Selama tahun 2008 telah terjadi sebanyak 3.815 insiden/kasus konflik massal yang tersebar di sebanyak 2.278 desa/kelurahan dari sebanyak 33 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Secara rata-rata pada setiap desa/kelurahan terjadi insiden konflik sebanyak 1-2 kali atau sebanyak 115–116 kali setiap provinsi. Namun demikian, insiden konflik tersebut tidak terjadi secara merata pada setiap desa/kelurahan maupun provinsi.

Seperti yang terlihat pada Gambar 4.2.2, intensitas dari insiden konflik massal yang terjadi pada setiap provinsi nampak cukup bervariasi dengan jumlah kasus berkisar antara 6 - 503 kasus. Provinsi yang seringkali mengalami kejadian konflik massal selama tahun 2008 berturut-turut adalah Papua (503 kasus), Jawa Barat (443 kasus), Jawa Tengah (385 kasus), Nusa Tenggara Timur (282 kasus) dan Jawa Timur (268 kasus). Sebaliknya, jumlah kasus yang paling sedikit berturut-turut ditemukan di provinsi Kepulauan Riau (6 kasus), Bali (8 kasus), Yogyakarta (10 kasus) dan Sulawesi Barat (11 kasus).

Gambar 4.2.2.
Banyaknya Kejadian Konflik Massal menurut Provinsi, Tahun 2008



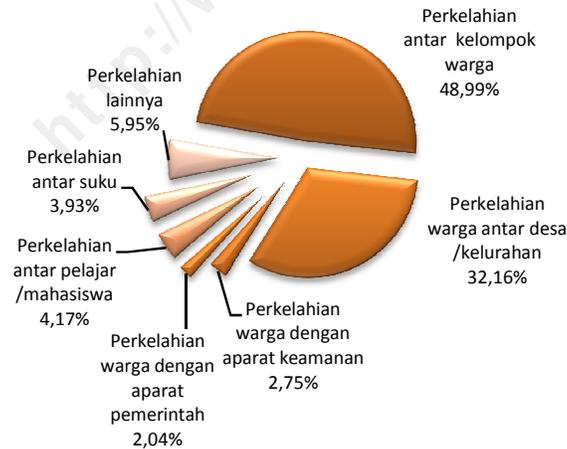
Gambar 4.2.2 juga menunjukkan bahwa empat dari sepuluh provinsi yang paling sering mengalami konflik massal terletak di pulau Jawa, yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Gambaran ini merupakan indikasi bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki potensi konflik massal paling besar dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

4.3. Karakteristik Konflik Massal

Dilihat dari karakteristik pelaku-pelakunya, konflik massal dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal merupakan konflik yang pelaku-pelaku berasal dari status atau kelompok sosial yang sama, misalnya konflik antar kelompok warga, konflik warga antar desa/kelurahan, konflik antar pelajar dan konflik antar suku. Konflik vertikal merupakan konflik yang para pelakunya berasal dari status atau kelompok sosial yang berbeda, misalnya konflik antara warga dengan aparat keamanan atau aparat pemerintah.

Fenomena konflik massal yang terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia pada umumnya berupa perkelahian massal yang melibatkan kontak fisik secara langsung. Seperti yang disajikan pada Gambar 4.3.1, insiden perkelahian massal yang terjadi di berbagai desa /kelurahan mayoritas merupakan konflik horizontal, antara lain perkelahian antar kelompok warga (44,82 persen desa/kelurahan), perkelahian warga antar desa /kelurahan (36,83 persen), perkelahian antar suku (4,04 persen) dan perkelahian antar pelajar/mahasiswa (3,91 persen), sedangkan sebagian kecil lainnya tergolong sebagai konflik vertikal antara lain berupa perkelahian antara warga dengan aparat keamanan (2,90 persen) dan perkelahian antara warga dengan aparat pemerintah (1,67 persen).

Gambar 4.3.1.
Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami Konflik Massal
menurut Jenis Konflik Massal, Tahun 2008

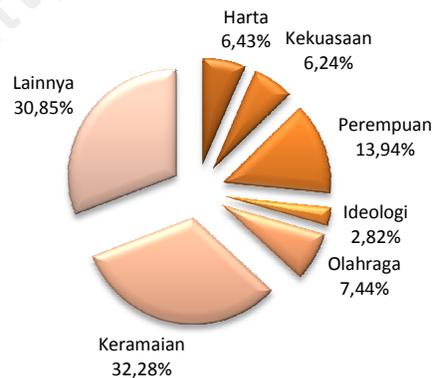


Sejalan dengan pola konflik massal nasional, perkelahian antar kelompok warga dan perkelahian warga antar desa/kelurahan juga merupakan jenis-jenis konflik yang paling sering terjadi di seluruh provinsi. Proporsi desa/kelurahan pada setiap provinsi yang mengalami insiden perkelahian antar kelompok warga (kecuali provinsi Kepulauan Riau) berkisar antara 28,30 – 78,95 persen, sedangkan untuk insiden perkelahian warga antar desa/kelurahan (kecuali provinsi Yogyakarta) proporsinya berkisar antara 4,35 – 62,5 persen. Insiden perkelahian massal lainnya, seperti perkelahian/tawuran antar pelajar/mahasiswa, perkelahian antar suku dan perkelahian warga dengan aparat, selain persentasenya relatif kecil, kasusnya pun hanya terjadi di beberapa provinsi tertentu. Kasus perkelahian/tawuran antar pelajar /mahasiswa yang menonjol hanya terjadi di provinsi DKI Jakarta (62,5 persen) dan Yogyakarta (33,3 persen) sedangkan kasus perkelahian antar suku hanya terjadi di provinsi Papua, Yogyakarta dan Kalimantan Timur (lihat Tabel 17).

4.4. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Massal

Peristiwa konflik massal apapun jenis dan bentuknya terjadi karena adanya faktor-faktor yang menjadi pemicu, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor yang dapat memicu terjadinya konflik massal antara lain adalah harta, kekuasaan, perempuan, ideologi, olahraga, keramaian, dan lainnya. Gambar 4.4.1 menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik massal umumnya adalah adanya keramaian (32,28 persen), masalah perempuan (13,94 persen) dan pertandingan olahraga (7,44 persen). Insiden konflik massal yang dipicu oleh masalah perbedaan ideologi persentasenya hanya sekitar 2,82 persen.

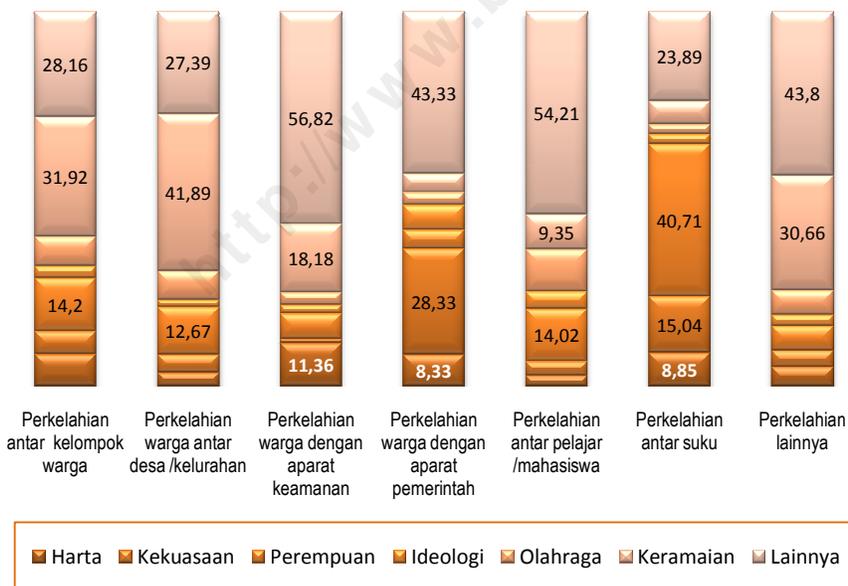
Gambar 4.4.1.
Persentase Penyebab Utama Konflik Massal, Tahun 2008



Pemicu atau penyebab terjadi konflik massal nampak bervariasi sesuai dengan jenis dan bentuk konflik. Dari Gambar 4.4.2 nampak bahwa konflik massal berupa perkelahian antar kelompok warga mayoritas terjadi karena adanya keramaian/pertunjukkan hiburan (31,92 persen) dan faktor perempuan (14,2 persen). Kedua faktor tersebut juga merupakan pemicu terjadinya perkelahian warga antar desa/kelurahan masing-masing dengan persentase sebesar 41,89 persen dan sebesar 12,67 persen.

Gambar 4.4.2 juga menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya insiden perkelahian/tawuran antar pelajar/mahasiswa juga masalah perempuan dengan persentase sebesar 14,02 persen, sedangkan pemicu lainnya adalah kegiatan/pertandingan olahraga dengan persentase sebesar 11,21 persen. Faktor perempuan juga merupakan penyebab utama terjadinya perkelahian antar suku (40,71 persen), sedangkan faktor pemicu lainnya adalah masalah kekuasaan (15,91 persen), antara lain berupa pertikaian batas wilayah, perebutan wilayah kekuasaan dan pertikaian/perebutan kekuasaan sebagai kepala suku dan jabatan adat lainnya.

Gambar 4.4.2.
Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Konflik Massal menurut Jenis dan Penyebab Utama, Tahun 2008



Seperti yang disajikan pada Gambar 4.4.2, kasus perkelahian massal antara warga dengan aparat keamanan sebagian besar berawal dari kejadian perkelahian atau keributan di tempat keramaian/pertunjukkan hiburan (18,18 persen) dan sengketa penguasaan harta atau kekayaan/tempat usaha (11,36 persen), antara lain berupa penyegelan rumah warga dan penutupan lokasi penggalian pasir, emas dan sebagainya. Sedangkan bentrokan antara warga dengan aparat pemerintah umumnya terkait dengan masalah sengketa kekuasaan (28,33 persen), antara lain pertikaian pasca pemilihan kepala desa (pilkades) dan unjuk rasa politis menentang atau mendukung salah seorang penguasa.

Insiden konflik massal yang terjadi di sejumlah wilayah desa/kelurahan di Indonesia pada umumnya disebabkan karena masalah perempuan (32,28 persen) dan adanya keramaian (13,94 persen). Kedua faktor tersebut juga merupakan pemicu utama insiden konflik massal yang terjadi di seluruh provinsi, kecuali di DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali dan Gorontalo. Insiden konflik massal di DKI Jakarta dan Bali pada mayoritas disebabkan karena masalah politik yang berkaitan dengan kekuasaan, sedangkan konflik massal yang terjadi di provinsi Yogyakarta dan Gorontalo umumnya merupakan eksekusi atau akibat dari penyelenggaraan suatu event pertandingan olahraga (lihat Tabel 18).

Fenomena lain yang menarik dari kasus kejadian konflik massal yang tersebar di berbagai provinsi adalah relatif kecilnya jumlah kasus konflik yang berawal dari masalah SARA (Suku, Agama dan Ras). Fenomena konflik massal yang dipicu oleh faktor SARA yang pernah merebak di berbagai wilayah di Indonesia pada awal dekade 20'an, selama lima tahun terakhir frekuensinya cenderung semakin menurun. Selama tahun 2008, persentase kejadian konflik massal yang dipicu oleh faktor perbedaan ideologi (SARA) secara nasional hanya sekitar 2,82 persen. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan insiden konflik massal yang dipicu oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor keramaian dan faktor perempuan yang persentasenya secara nasional masing-masing mencapai sebesar 32,28 persen dan 13,94 persen (lihat Tabel 18).

Insiden konflik massal yang dipicu oleh perbedaan ideologi/SARA untuk keseluruhan provinsi persentasenya masih relatif kecil yaitu hanya berkisar antara 0 – 6 persen, kecuali untuk provinsi Kalimantan Timur (21,74 persen), Gorontalo (11,11 persen) dan Nanggroe Aceh Darussalam (7,06 persen). Gambaran ini menunjukkan indikasi yang masih cukup menggembarakan, mengingat bahwa isu SARA merupakan isu yang sangat sensitif yang dapat mengganggu integritas dan keutuhan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar.

4.5. Upaya Penyelesaian Konflik

Konflik-konflik massal yang terjadi di suatu wilayah pada umumnya segera ditangani langsung oleh aparat keamanan setempat. Langkah-langkah preventif dan antisipatif untuk mencegah agar konflik tersebut tidak meluas segera dilakukan, antara lain berupa pembubaran massa hingga pemberlakuan jam malam. Di lain pihak, upaya pendekatan pada pihak-pihak yang bertikai juga dilakukan secara intensif untuk mencegah agar konflik tersebut tidak berulang kembali. Upaya pendekatan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan komponen masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, aparat keamanan dan lainnya.

Dari sebanyak 2.278 desa/kelurahan yang mengalami kejadian konflik massal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebanyak 2.100 desa/kelurahan atau sekitar 92,2 persen berhasil mengatasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di wilayahnya. Dalam konteks statistik, angka persentase jumlah kasus konflik yang berhasil diselesaikan dikenal dengan istilah cakupan penyelesaian konflik. Dari Gambar 4.5.1 nampak bahwa angka cakupan penyelesaian konflik massal selama tahun 2008 nampak bervariasi sesuai dengan jenis dan karakteristik konflik yang terjadi.

Gambar 4.5.1.
Persentase Penyelesaian Konflik menurut Jenis Konflik yang Paling Sering Terjadi

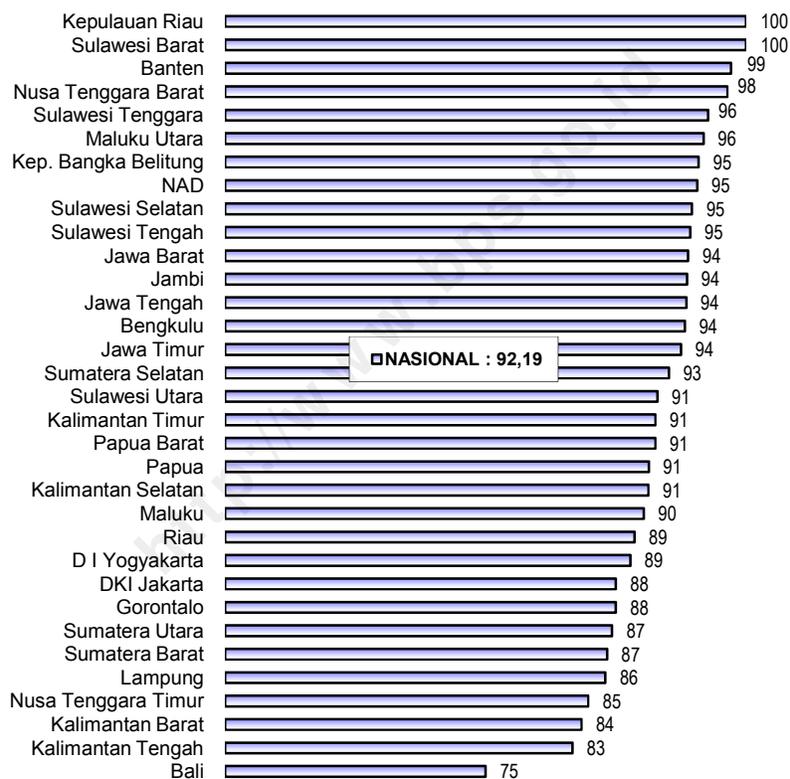


Secara umum, konflik massal yang berupa konflik horizontal seperti perkelahian antar kelompok warga atau perkelahian warga antar desa/kelurahan relatif lebih mudah diselesaikan dibandingkan dengan jenis konflik lainnya terutama konflik vertikal. Gambar 4.5.1 menunjukkan bahwa cakupan penyelesaian untuk kasus perkelahian antar kelompok warga dan kasus perkelahian warga antar desa/kelurahan masing-masing mencapai sebesar 93,93

persen dan 93,09 persen, sedangkan untuk perkelahian antar suku, perkelahian warga dengan aparat dan perkelahian warga dengan aparat keamanan cakupannya masih dari 90,0 persen, yaitu hanya sebesar 86,84 persen, 88,04 persen dan 89,39 persen.

Cakupan penyelesaian konflik massal yang berhasil dicapai oleh masing-masing provinsi juga terlihat sangat bervariasi dengan persentase berkisar antara 75,0 – 100 persen. Dari Gambar 4.5.2 nampak bahwa cakupan sebesar 100 persen berhasil dicapai provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Sebaliknya, angka cakupan penyelesaian konflik yang paling rendah terjadi di provinsi Bali (75,0 persen), DKI Jakarta (87,5 persen), Kalimantan Tengah (83,33 persen) dan Kalimantan Barat (84,21 persen).

Gambar 4.5.2.
Persentase Penyelesaian Konflik menurut Provinsi, Tahun 2008



Angka cakupan penyelesaian konflik massal pada masing-masing provinsi secara keseluruhan nampak sangat dipengaruhi oleh jenis konflik yang terjadi. Konflik massal berupa perkelahian antar kelompok warga di provinsi Bali tergolong sebagai konflik yang paling sulit

diselesaikan. Dari sebanyak tiga desa/kelurahan yang mengalami konflik tersebut, hanya sebanyak satu desa/kelurahan (33,3 persen) yang berhasil menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, konflik massal berupa perkelahian warga antar desa/kelurahan yang terjadi di delapan desa/kelurahan, seluruhnya dapat diselesaikan secara tuntas. Angka cakupan penyelesaian yang paling rendah untuk perkelahian warga antar desa/kelurahan ditemukan di provinsi Kalimantan Tengah dan Papua Barat masing-masing dengan persentase sebesar 33,3 persen dan 66,7 persen (lihat Tabel 21).

Angka cakupan penyelesaian konflik yang paling rendah untuk konflik massal berupa perkelahian warga dengan aparat keamanan ditemukan di provinsi Jambi (50,0 persen), Nusa Tenggara Timur (62,5 persen) dan Nanggroe Aceh Darussalam (66,7 persen). Untuk konflik berupa perkelahian warga dengan aparat pemerintah, angka penyelesaian yang paling rendah ditemukan di provinsi Lampung, Jawa Tengah dan Gorontalo, masing-masing dengan persentase yang sama sebesar 50,0 persen (lihat Tabel 21).

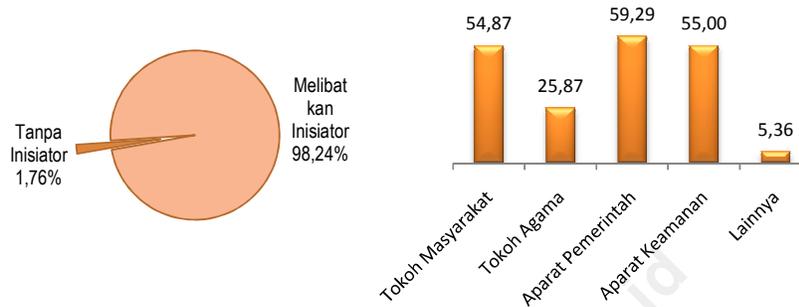
Konflik massal berupa perkelahian antar pelajar/mahasiswa yang terjadi selama tahun 2008 pada semua provinsi seluruhnya dapat diselesaikan secara tuntas, kecuali di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, semua provinsi di Jawa (kecuali Jawa Timur) dan Papua. Angka cakupan penyelesaian konflik yang paling rendah untuk jenis konflik tersebut dicapai oleh provinsi Papua (33,33 persen), Nanggroe Aceh Darussalam (66,67 persen) dan Yogyakarta (66,67 persen). Konflik massal berupa perkelahian antar suku yang terjadi pada sejumlah provinsi secara umum dapat diselesaikan secara tuntas, kecuali di provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua (lihat Tabel 21).

Cakupan penyelesaian konflik yang dapat dicapai di setiap provinsi juga nampak dipengaruhi oleh cara/jenis upaya yang dilakukan. Dari Gambar 4.5.3 nampak bahwa dari sebanyak 2.278 desa/kelurahan yang mengalami konflik, sebanyak 2.238 desa/kelurahan (98,24 persen) melibatkan tokoh setempat sebagai perantara (*inisiator/mediator*). Perantara ini berperan melakukan pendekatan/kompromi dengan pihak-pihak yang bertikai. Penyertaan inisiator/mediator dalam penyelesaian konflik massal ini sangat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat.

Tokoh yang biasa dilibatkan untuk menjalankan tugas sebagai inisiator/mediator dalam penyelesaian konflik masyarakat pada umumnya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, aparat keamanan dan lainnya. Pemilihan inisiator/mediator

tersebut selain didasarkan pada hasil kesepakatan warga, juga disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai. Inisiator/mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan konflik seringkali lebih dari satu orang, misalnya tokoh masyarakat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan aparat keamanan, atau kombinasi-kombinasi lainnya.

Gambar 4.5. 3.
Cara Penyelesaian dan Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Konflik Tahun 2008



Seperti yang disajikan pada Gambar 4.5.3, orang atau tokoh yang paling sering dilibatkan sebagai inisiator/mediator untuk menyelesaikan konflik adalah aparat pemerintah. Dari sebanyak 2.238 desa/kelurahan yang melibatkan inisiator/mediator untuk menyelesaikan konflik, sebanyak 1.327 desa/kelurahan atau sekitar 59,29 persen melibatkan aparat pemerintah sebagai inisiator/mediator. Tokoh-tokoh lainnya yang paling sering dilibatkan sebagai inisiator/mediator konflik secara berurutan adalah aparat keamanan (55,0 persen), tokoh masyarakat (54,87 persen), tokoh agama (25,87 persen) dan lainnya (5,36 persen).

Cara penyelesaian konflik dengan melibatkan inisiator/mediator juga merupakan cara yang paling umum dilakukan di setiap provinsi. Persentase desa/kelurahan yang melakukan penyelesaian konflik dengan melibatkan inisiator/mediator pada masing-masing provinsi secara keseluruhan berkisar antara 88,89 – 100 persen. Dari sebanyak 33 provinsi secara keseluruhan, sebanyak 18 provinsi (54,5 persen) di antaranya selalu melibatkan inisiator/mediator untuk menyelesaikan setiap konflik massal yang terjadi di wilayahnya, termasuk provinsi Maluku Utara dan Papua Barat (lihat Tabel 22).

Tokoh atau orang yang terpilih sebagai inisiator/mediator dalam upaya penyelesaian konflik di masing-masing provinsi nampak bervariasi. Pada sebagian besar provinsi di pulau Sumatera dan seluruh provinsi di Kalimantan, peranan tokoh masyarakat sebagai

inisiator/mediator konflik nampak lebih menonjol dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Sementara pada semua provinsi di pulau Jawa dan Sulawesi, peranan aparat, baik aparat pemerintah maupun aparat keamanan sebagai insiator dalam penyelesaian insiden konflik nampak lebih dominan (lihat Tabel 23).

Peranan masing-masing insiator/mediator dalam penyelesaian konflik juga nampak dipengaruhi oleh jenis konflik massal yang terjadi. Inisiator yang paling berperan dalam menyelesaikan konflik berupa perkelahian antar kelompok warga adalah aparat pemerintah. Seperti yang disajikan pada Tabel 24, dari sebanyak 1.010 desa/kelurahan yang melibatkan insiator/mediator untuk mengatasi kejadian perkelahian antar kelompok warga di wilayahnya, sebanyak 585 desa/kelurahan melibatkan aparat pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya. Inisiator lainnya yang juga sangat berperan dalam menyelesaikan jenis konflik tersebut berturut-turut adalah tokoh masyarakat (571 desa/kelurahan) dan aparat keamanan (527 desa/kelurahan).

Aparat pemerintah juga paling berperan sebagai insiator dalam menyelesaikan konflik berupa perkelahian warga antar desa/kelurahan. Seperti yang terlihat pada Tabel 24, keterlibatan aparat pemerintah sebagai insiator mencakup sebanyak 515 desa/kelurahan dari sebanyak 827 desa/kelurahan yang mengalami konflik tersebut. Inisiator lainnya yang juga banyak dilibatkan untuk menyelesaikan kasus tersebut berturut-turut adalah aparat keamanan (502 desa /kelurahan) dan tokoh masyarakat (473 desa/kelurahan).

Insiator yang paling berperan dalam menyelesaikan konflik berupa perkelahian warga dengan aparat pemerintah dan perkelahian warga aparat keamanan adalah aparat pemerintah dan aparat keamanan. Tabel 24 menunjukkan bahwa dari sebanyak 65 desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian warga dengan aparat keamanan, sebanyak 46 desa/kelurahan melibatkan aparat keamanan untuk menyelesaikan konflik dan sebanyak 35 desa/kelurahan melibatkan aparat pemerintah sebagai mediator. Untuk kasus perkelahian warga dengan aparat pemerintah yang terjadi di sebanyak 37 desa/kelurahan, sebanyak 22 desa/kelurahan melibatkan aparat pemerintah sebagai mediator dan sebanyak 18 desa/kelurahan melibatkan aparat keamanan untuk menyelesaikan konflik di wilayahnya.

Aparat pemerintah dan aparat keamanan merupakan insiator/mediator yang paling berperan dalam penyelesaian konflik berupa perkelahian/tawuran antar pelajar/mahasiswa. Dari sebanyak 86 desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian antar pelajar

/mahasiswa, sebanyak 49 desa/kelurahan diselesaikan dengan bantuan aparat keamanan dan sebanyak 42 desa/kelurahan diselesaikan dengan bantuan aparat pemerintah. Peranan aparat pemerintah yang paling menonjol terlihat secara signifikan pada penyelesaian konflik berupa perkelahian antar suku. Dari sebanyak 88 desa/kelurahan yang mengalami insiden perkelahian antar suku, sebanyak 62 desa/kelurahan atau sekitar 70,5 persen diselesaikan dengan bantuan aparat pemerintah (lihat Tabel 24).

<http://www.bps.go.id>

TABEL LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*) menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2005-2007

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	2.181	986	3.053
Sumatera Utara	25.111	27.785	28.642
Sumatera Barat	7.203	9.953	9.499
Riau	6.855	6.277	9.767
Jambi	2.202	1.969	1.945
Sumatera Selatan	8.579	8.294	2.426
Bengkulu	1.100	1.654	9.966
Lampung	4.253	6.052	6.577
Bangka Belitung	1.218	1.843	2.284
Kepulauan Riau	1.984	3.442	3.233
Metro Jaya ¹⁾	57.762	60.996	63.661
Jawa Barat	19.574	22.098	22.160
Jawa Tengah	12.823	18.873	19.806
DI Yogyakarta	3.429	2.913	4.316
Jawa Timur	30.476	42.583	43.822
Banten	1.946	1.660	1.771
Bali	5.902	7.420	7.590
Nusa Tenggara Barat	4.342	6.327	6.885
Nusa Tenggara Timur	5.105	5.011	6.575
Kalimantan Barat	5.145	8.738	10.532
Kalimantan Tengah	3.026	3.100	3.068
Kalimantan Selatan	2.757	3.439	4.080
Kalimantan Timur	6.778	7.472	8.309
Sulawesi Utara	9.181	9.814	10.275
Sulawesi Tengah	4.935	5.048	6.272
Sulawesi Selatan ²⁾	12.571	14.214	16.387
Sulawesi Tenggara	583	1.007	5.940
Gorontalo	2.681	2.724	4.421
Maluku	902	1.039	1.726
Maluku Utara	542	883	714
Papua ²⁾	5.387	5.549	4.682
Indonesia	256.431	299.168	330.354

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 2
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*)
menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2005-2007

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	6	33	46
Sumatera Utara	70	64	100
Sumatera Barat	60	60	63
Riau	62	57	57
Jambi	60	67	43
Sumatera Selatan	60	46	70
Bengkulu	43	50	51
Lampung	89	99	101
Bangka Belitung	70	64	61
Kepulauan Riau	57	61	59
Metro Jaya ¹⁾	33	38	47
Jawa Barat	59	61	61
Jawa Tengah	73	76	83
DI Yogyakarta	52	53	46
Jawa Timur	77	83	77
Banten	47	31	30
Bali	64	71	71
Nusa Tenggara Barat	61	56	57
Nusa Tenggara Timur	61	66	56
Kalimantan Barat	59	57	58
Kalimantan Tengah	74	57	92
Kalimantan Selatan	82	97	61
Kalimantan Timur	48	51	64
Sulawesi Utara	55	56	57
Sulawesi Tengah	37	39	42
Sulawesi Selatan ²⁾	59	66	65
Sulawesi Tenggara	57	7	50
Gorontalo	74	79	56
Maluku	73	70	47
Maluku Utara	50	43	44
Papua ²⁾	63	68	61
Indonesia	57	60	64

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 3
Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) menurut Kepolisian Daerah,
Tahun 2005-2007

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	04.00'36"	08.52'48"	02.51'36"
Sumatera Utara	00.20'55"	00.18'54"	00.18'21"
Sumatera Barat	01.12'36"	00.52'48"	00.55'19"
Riau	01.16'12"	01.23'24"	00.53'48"
Jambi	03.58'12"	04.26'24"	04.30'00"
Sumatera Selatan	01.01'12"	01.03'00"	03.26'30"
Bengkulu	07.57'36"	05.17'24"	00.52'43"
Lampung	02.03'00"	01.26'24"	01.19'48"
Bangka Belitung	07.11'12"	04.45'00"	03.49'48"
Kepulauan Riau	04.24'36"	02.32'24"	02.42'00"
Metro Jaya ¹⁾	00.09'05"	00.08'36"	00.08'14"
Jawa Barat	00.26'51"	00.23'46"	00.23'42"
Jawa Tengah	00.40'58"	00.27'46"	00.26'31"
DI Yogyakarta	02.33'00"	03.00'00"	02.01'12"
Jawa Timur	00.17'14"	00.12'20"	00.11'59"
Banten	04.30'00"	05.16'12"	04.56'24"
Bali	01.28'48"	01.10'48"	01.09'00"
Nusa Tenggara Barat	02.00'36"	01.22'48"	01.16'12"
Nusa Tenggara Timur	01.42'36"	01.44'24"	01.19'48"
Kalimantan Barat	01.42'00"	01.00'00"	00.49'54"
Kalimantan Tengah	02.53'24"	02.49'12"	02.51'00"
Kalimantan Selatan	03.10'12"	02.32'24"	02.04'48"
Kalimantan Timur	01.17'24"	01.10'12"	00.57'39"
Sulawesi Utara	00.57'14"	00.53'33"	00.51'09"
Sulawesi Tengah	01.46'12"	01.43'48"	01.23'24"
Sulawesi Selatan ²⁾	00.41'48"	00.36'58"	00.33'38"
Sulawesi Tenggara	15.01'12"	08.41'24"	01.28'12"
Gorontalo	03.15'36"	03.12'36"	01.58'48"
Maluku	07.42'36"	08.25'48"	05.04'12"
Maluku Utara	20.22'12"	09.55'12"	09.34'48"
Papua ²⁾	01.37'12"	01.34'12"	01.52'12"
Indonesia	00.02'02"	00.01'45"	00.01'35"

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 4
Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 penduduk menurut
Kepolisian Daerah, Tahun 2005-2007

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	53	22	69
Sumatera Utara	220	225	232
Sumatera Barat	163	214	204
Riau	193	136	212
Jambi	84	74	123
Sumatera Selatan	125	123	91
Bengkulu	69	105	147
Lampung	58	84	91
Bangka Belitung	114	180	224
Kepulauan Riau	159	287	270
Metro Jaya ¹⁾	347	346	361
Jawa Barat	62	62	62
Jawa Tengah	37	56	59
DI Yogyakarta	108	87	129
Jawa Timur	86	113	116
Banten	45	18	19
Bali	188	213	217
Nusa Tenggara Barat	113	152	164
Nusa Tenggara Timur	136	118	159
Kalimantan Barat	136	212	257
Kalimantan Tengah	157	163	93
Kalimantan Selatan	87	104	221
Kalimantan Timur	202	265	323
Sulawesi Utara	489	443	463
Sulawesi Tengah	226	219	272
Sulawesi Selatan ²⁾	159	173	190
Sulawesi Tenggara	36	51	304
Gorontalo	304	297	481
Maluku	65	82	136
Maluku Utara	48	99	103
Papua ²⁾	249	226	191
Indonesia	121	131	145

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 5
Jumlah Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia menurut Jenis Tindak Pidana dan
Kepolisian Daerah, Tahun 2007

Kepolisian Daerah	Jenis Tindak Pidana				
	Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan ringan	Penganiayaan berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	26	30	277	236	39
Sumatera Utara	88	240	1.651	4.287	31
Sumatera Barat	22	74	1.269	880	15
Riau	33	130	1.293	242	49
Jambi	13	40	75	78	5
Sumatera Selatan	34	43	-	266	-
Bengkulu	112	105	234	1.008	31
Lampung	56	153	22	308	9
Bangka Belitung	14	21	122	207	1
Kepulauan Riau	12	35	209	25	4
Metro Jaya ¹⁾	70	130	1.479	2.469	103
Jawa Barat	78	189	708	1.161	43
Jawa Tengah	83	138	585	339	15
DI Yogyakarta	31	22	292	29	18
Jawa Timur	184	242	1.283	1.650	29
Banten	60	30	1	132	-
Bali	12	22	265	14	4
Nusa Tenggara Barat	23	103	1.129	91	10
Nusa Tenggara Timur	38	136	1.672	77	35
Kalimantan Barat	19	50	742	190	21
Kalimantan Tengah	57	42	97	278	-
Kalimantan Selatan	18	44	231	94	6
Kalimantan Timur	44	96	286	550	-
Sulawesi Utara	58	74	688	114	61
Sulawesi Tengah	14	49	1.232	139	15
Sulawesi Selatan ²⁾	110	141	2.315	943	21
Sulawesi Tenggara	36	72	225	122	4
Gorontalo	2	115	667	9	-
Maluku	11	45	214	32	-
Maluku Utara	5	26	18	8	-
Papua ²⁾	13	59	177	652	-
Indonesia	1.376	2.696	19.458	16.630	569

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 6
Jumlah Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) menurut Jenis Tindak Pidana dan
Kepolisian Daerah, Tahun 2007

Kepolisian Daerah	Jenis Tindak Pidana				
	Pembakaran dengan sengaja	Pengrusakan/ penghancuran barang	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian ringan	Pencurian dengan kekerasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	13	52	273	33	200
Sumatera Utara	96	857	6.032	55	644
Sumatera Barat	11	352	2.054	14	350
Riau	66	286	1.502	359	635
Jambi	1	9	566	161	62
Sumatera Selatan	4	32	714	-	164
Bengkulu	19	93	2.358	418	835
Lampung	3	13	1.748	22	496
Bangka Belitung	7	53	359	1	77
Kepulauan Riau	13	41	297	47	212
Metro Jaya ¹⁾	16	494	19.282	188	1.812
Jawa Barat	12	204	6.284	124	650
Jawa Tengah	55	115	2.621	281	245
DI Yogyakarta	3	50	944	-	122
Jawa Timur	21	369	6.779	1.146	1.078
Banten	3	1	536	-	178
Bali	16	122	720	2	56
Nusa Tenggara Barat	3	244	759	80	281
Nusa Tenggara Timur	25	298	316	-	49
Kalimantan Barat	30	209	1.134	9	446
Kalimantan Tengah	-	-	461	-	157
Kalimantan Selatan	66	36	541	192	132
Kalimantan Timur	-	122	1.527	-	303
Sulawesi Utara	16	532	183	12	15
Sulawesi Tengah	10	242	814	35	47
Sulawesi Selatan ²⁾	31	539	1.158	20	432
Sulawesi Tenggara	24	274	525	7	51
Gorontalo	4	176	139	33	4
Maluku	2	30	82	5	6
Maluku Utara	1	28	11	-	2
Papua ²⁾	8	325	443	3	29
Indonesia	579	6.198	61.162	3.247	9.770

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 6

Kepolisian Daerah	Jenis Tindak Pidana				
	Pencurian dalam keluarga	Penipuan/perbuatan curang	Penadahan	Pencurian kendaraan bermotor	Pencurian biasa
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Darussalam	2	216	16	776	115
Sumatera Utara	52	1.499	13	2.019	1.807
Sumatera Barat	23	618	9	330	620
Riau	25	1.012	27	1.286	876
Jambi	13	75	7	298	54
Sumatera Selatan	-	209	-	686	313
Bengkulu	153	498	16	97	133
Lampung	1	102	3	1.304	20
Bangka Belitung	-	125	3	107	138
Kepulauan Riau	3	294	7	295	470
Metro Jaya ¹⁾	74	7.492	54	11.238	2.606
Jawa Barat	24	2.527	32	4.037	862
Jawa Tengah	41	1.090	70	1.507	999
DI Yogyakarta	3	565	4	998	652
Jawa Timur	138	3.641	207	4.036	1.915
Banten	-	285	1	441	95
Bali	9	635	4	290	630
Nusa Tenggara Barat	8	620	42	350	408
Nusa Tenggara Timur	3	327	23	14	583
Kalimantan Barat	-	593	-	749	1.306
Kalimantan Tengah	-	192	-	195	271
Kalimantan Selatan	-	95	5	283	247
Kalimantan Timur	-	581	3	598	715
Sulawesi Utara	25	954	2	13	1.022
Sulawesi Tengah	29	557	6	22	738
Sulawesi Selatan ²⁾	13	1.400	14	619	1.819
Sulawesi Tenggara	4	419	11	94	786
Gorontalo	13	349	2	-	399
Maluku	1	85	1	10	153
Maluku Utara	1	68	-	12	78
Papua ²⁾	1	375	-	-	459
Indonesia	659	27.498	582	32.704	21.289

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 7
Jumlah WNI Pelaku Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah dan Jenis Kelamin,
Tahun 2007

Kepolisian Daerah	Dewasa			Anak-anak			Jumlah		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NAD	3.125	-	3.125	-	-	-	3.125	-	3.125
Sumatera Utara	24.590	1.151	25.741	1.523	10	1.533	26.113	1.161	27.274
Sumatera Barat	5.523	-	5.523	-	-	-	5.523	-	5.523
Riau	19.981	-	19.981	-	-	-	19.981	-	19.981
Jambi	2.214	-	2.214	-	-	-	2.214	-	2.214
Sumatera Selatan	10.789	164	10.953	77	-	77	10.866	164	11.030
Bengkulu	1.781	9	1.790	-	-	-	1.781	9	1.790
Lampung	1.069	13	1.082	30	2	32	1.099	15	1.114
Bangka Belitung	1.111	-	1.111	-	-	-	1.111	-	1.111
Kepulauan Riau	3.288	44	3.332	6	-	6	3.294	44	3.338
Metro Jaya ¹⁾	8.326	261	8.587	23	-	23	8.349	261	8.610
Jawa Barat	10.182	58	10.240	18	3	21	10.200	61	10.261
Jawa Tengah	11.408	381	11.789	550	242	792	11.958	623	12.581
DI Yogyakarta	1.712	307	2.019	54	39	93	1.766	346	2.112
Jawa Timur	29.496	531	30.027	92	2	94	29.588	533	30.121
Banten	148	10	158	3	13	16	151	23	174
Bali	6.215	122	6.337	-	-	-	6.215	122	6.337
Nusa Tenggara Barat	5.715	225	5.940	68	17	85	5.783	242	6.025
Nusa Tenggara Timur	6.793	45	6.838	13	13	26	6.806	58	6.864
Kalimantan Barat	5.792	87	5.879	-	-	-	5.792	87	5.879
Kalimantan Tengah	316	-	316	-	-	-	316	-	316
Kalimantan Selatan	2.128	96	2.224	154	5	159	2.282	101	2.383
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	6.413	372	6.785	71	5	76	6.484	377	6.861
Sulawesi Tengah	2.024	4	2.028	-	-	-	2.024	4	2.028
Sulawesi Selatan ²⁾	6.581	102	6.683	1	-	1	6.582	102	6.684
Sulawesi Tenggara	3.931	16	3.947	-	-	-	3.931	16	3.947
Gorontalo	1.968	628	2.596	69	-	69	2.037	628	2.665
Maluku	4.481	8	4.489	-	-	-	4.481	8	4.489
Maluku Utara	558	66	624	24	8	32	582	74	656
Papua ²⁾	29.788	34	29.822	8	1	9	29.796	35	29.831
Indonesia	217.446	4.734	222.180	2.784	360	3.144	220.230	5.094	225.324

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

L = laki-laki, P=Perempuan, L+P = Laki-laki + Perempuan

Tabel 8
Jumlah WNA Pelaku Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah dan Jenis Kelamin
Tahun 2007

Kepolisian Daerah	Dewasa			Anak-anak			Jumlah		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	43	1	44	-	-	-	43	1	44
Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	2	2	4	-	-	-	2	2	4
Bengkulu	2	-	2	-	-	-	2	-	2
Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metro Jaya ¹⁾	2	2	4	-	-	-	2	2	4
Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI Yogyakarta	4	4	8	1	-	1	5	4	9
Jawa Timur	71	-	71	-	-	-	71	-	71
Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	1	2	3	-	-	-	1	2	3
Maluku	3	-	3	-	-	-	3	-	3
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia	128	12	140	1	-	1	129	12	141

Sumber : Mabes Poli

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

L = laki-laki, P=Perempuan, L+P = Laki-laki + Perempuan

Tabel 9
Jumlah Pelaku Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin,
Tahun 2007

Kepolisian Daerah	WNI			WNA			Jumlah		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NAD	3.125	-	3.125	-	-	-	3.125	-	3.125
Sumatera Utara	26.113	1.161	27.274	43	1	44	26.156	1.162	27.318
Sumatera Barat	5.523	-	5.523	-	-	-	5.523	-	5.523
Riau	19.981	-	19.981	-	-	-	19.981	-	19.981
Jambi	2.214	-	2.214	-	-	-	2.214	-	2.214
Sumatera Selatan	10.866	164	11.030	2	2	4	10.868	166	11.034
Bengkulu	1.781	9	1.790	2	-	2	1.783	9	1.792
Lampung	1.099	15	1.114	-	-	-	1.099	15	1.114
Bangka Belitung	1.111	-	1.111	-	-	-	1.111	-	1.111
Kepulauan Riau	3.294	44	3.338	-	-	-	3.294	44	3.338
Metro Jaya ¹⁾	8.349	261	8.610	2	2	4	8.351	263	8.614
Jawa Barat	10.200	61	10.261	-	-	-	10.200	61	10.261
Jawa Tengah	11.958	623	12.581	-	-	-	11.958	623	12.581
DI Yogyakarta	1.766	346	2.112	5	4	9	1.771	350	2.121
Jawa Timur	29.588	533	30.121	71	-	71	29.659	533	30.192
Banten	151	23	174	-	-	-	151	23	174
Bali	6.215	122	6.337	-	-	-	6.215	122	6.337
Nusa Tenggara Barat	5.783	242	6.025	-	-	-	5.783	242	6.025
Nusa Tenggara Timur	6.806	58	6.864	-	-	-	6.806	58	6.864
Kalimantan Barat	5.792	87	5.879	-	-	-	5.792	87	5.879
Kalimantan Tengah	316	-	316	-	-	-	316	-	316
Kalimantan Selatan	2.282	101	2.383	-	-	-	2.282	101	2.383
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	6.484	377	6.861	-	1	1	6.484	378	6.862
Sulawesi Tengah	2.024	4	2.028	-	-	-	2.024	4	2.028
Sulawesi Selatan ²⁾	6.582	102	6.684	-	-	-	6.582	102	6.684
Sulawesi Tenggara	3.931	16	3.947	-	-	-	3.931	16	3.947
Gorontalo	2.037	628	2.665	1	2	3	2.038	630	2.668
Maluku	4.481	8	4.489	3	-	3	4.484	8	4.492
Maluku Utara	582	74	656	-	-	-	582	74	656
Papua ²⁾	29.796	35	29.831	-	-	-	29.796	35	29.831
Indonesia	220.230	5.094	225.324	129	12	141	220.359	5.106	225.465

Sumber : Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulselbar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

L = laki-laki, P=Perempuan, L+P = Laki-laki + Perempuan

Tabel 10
Persentase Penduduk yang Pernah menjadi Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,77	0,83	0,81
Sumatera Utara	1,02	0,89	0,94
Sumatera Barat	1,86	0,95	1,23
Riau	1,62	0,97	1,20
Jambi	1,32	1,00	1,09
Sumatera Selatan	1,67	1,33	1,45
Bengkulu	2,00	1,30	1,49
Lampung	1,79	1,45	1,53
Bangka Belitung	1,30	1,11	1,19
Kepulauan Riau	0,71	0,68	0,71
DKI Jakarta	1,84		1,84
Jawa Barat	1,35	1,23	1,29
Jawa Tengah	1,11	0,93	1,00
DI Yogyakarta	2,48	0,81	1,82
Jawa Timur	1,63	1,19	1,37
Banten	2,16	1,14	1,70
Bali	0,95	0,65	0,81
Nusa Tenggara Barat	2,26	2,59	2,47
Nusa Tenggara Timur	2,64	2,83	2,80
Kalimantan Barat	1,81	0,56	0,90
Kalimantan Tengah	0,79	0,70	0,73
Kalimantan Selatan	1,49	1,19	1,31
Kalimantan Timur	1,31	0,87	1,11
Sulawesi Utara	1,32	1,42	1,38
Sulawesi Tengah	2,04	1,22	1,39
Sulawesi Selatan	1,14	1,04	1,07
Sulawesi Tenggara	1,84	0,75	0,99
Gorontalo	1,29	2,10	1,89
Sulawesi Barat	0,76	0,59	0,61
Maluku	1,46	3,60	2,98
Maluku Utara	1,21	1,12	1,14
Irian Jaya Barat	2,53	0,58	1,19
Papua	2,01	1,58	1,70
Indonesia	1,50	1,18	1,32

Sumber : Susenas 2007

Tabel 11
Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	22,14	77,86	100,00
Sumatera Utara	47,72	52,28	100,00
Sumatera Barat	46,82	53,18	100,00
Riau	47,49	52,51	100,00
Jambi	34,66	65,34	100,00
Sumatera Selatan	39,99	60,01	100,00
Bengkulu	37,31	62,69	100,00
Lampung	26,13	73,87	100,00
Bangka Belitung	45,09	54,91	100,00
Kepulauan Riau	80,57	19,43	100,00
DKI Jakarta	100,00	0,00	100,00
Jawa Barat	55,29	44,71	100,00
Jawa Tengah	46,44	53,56	100,00
DI Yogyakarta	82,53	17,47	100,00
Jawa Timur	50,21	49,79	100,00
Banten	70,00	30,00	100,00
Bali	62,14	37,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	34,67	65,33	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,77	84,23	100,00
Kalimantan Barat	54,53	45,47	100,00
Kalimantan Tengah	32,02	67,98	100,00
Kalimantan Selatan	43,47	56,53	100,00
Kalimantan Timur	64,23	35,77	100,00
Sulawesi Utara	35,07	64,93	100,00
Sulawesi Tengah	30,21	69,79	100,00
Sulawesi Selatan	33,97	66,03	100,00
Sulawesi Tenggara	40,89	59,11	100,00
Gorontalo	18,34	81,66	100,00
Sulawesi Barat	18,82	81,18	100,00
Maluku	14,10	85,90	100,00
Maluku Utara	27,01	72,99	100,00
Irian Jaya Barat	66,84	33,16	100,00
Papua	32,47	67,53	100,00
Indonesia	49,57	50,43	100,00

Sumber : Susenas 2007

Tabel 12
Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Provinsi	Jenis Kelamin		TT	Total
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	63,42	32,55	4,03	100,00
Sumatera Utara	62,26	37,08	0,66	100,00
Sumatera Barat	60,73	37,77	1,49	100,00
Riau	60,78	37,47	1,75	100,00
Jambi	62,94	35,34	1,72	100,00
Sumatera Selatan	67,52	29,93	2,55	100,00
Bengkulu	71,23	28,56	0,22	100,00
Lampung	74,75	23,96	1,29	100,00
Bangka Belitung	66,94	32,11	0,95	100,00
Kepulauan Riau	53,60	45,50	0,90	100,00
DKI Jakarta	54,49	44,70	0,81	100,00
Jawa Barat	65,84	33,59	0,57	100,00
Jawa Tengah	66,92	32,02	1,06	100,00
DI Yogyakarta	63,61	34,61	1,78	100,00
Jawa Timur	64,70	34,17	1,13	100,00
Banten	64,90	33,96	1,14	100,00
Bali	63,99	34,21	1,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	65,63	34,29	0,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	68,43	30,91	0,67	100,00
Kalimantan Barat	61,01	35,23	3,76	100,00
Kalimantan Tengah	68,30	30,49	1,21	100,00
Kalimantan Selatan	66,38	33,00	0,62	100,00
Kalimantan Timur	58,56	38,20	3,24	100,00
Sulawesi Utara	68,57	30,64	0,79	100,00
Sulawesi Tengah	64,56	33,61	1,83	100,00
Sulawesi Selatan	60,35	38,98	0,68	100,00
Sulawesi Tenggara	53,70	44,72	1,58	100,00
Gorontalo	75,33	24,43	0,24	100,00
Sulawesi Barat	68,36	30,02	1,61	100,00
Maluku	56,94	42,90	0,16	100,00
Maluku Utara	71,89	27,72	0,38	100,00
Irian Jaya Barat	67,53	27,97	4,50	100,00
Papua	66,74	30,94	2,32	100,00
Indonesia	64,74	34,15	1,10	100,00

Sumber : Susenas 2007

Tabel 13
Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Kelompok Usia

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Kelompok Usia		TT	Total
	Anak	Dewasa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	9,11	86,86	4,03	100,00
Sumatera Utara	8,76	90,58	0,66	100,00
Sumatera Barat	6,54	91,97	1,49	100,00
Riau	13,12	85,13	1,75	100,00
Jambi	9,86	88,42	1,72	100,00
Sumatera Selatan	6,33	91,12	2,55	100,00
Bengkulu	4,85	94,94	0,22	100,00
Lampung	3,93	94,78	1,29	100,00
Bangka Belitung	5,98	93,07	0,95	100,00
Kepulauan Riau	14,65	84,46	0,90	100,00
DKI Jakarta	6,86	92,33	0,81	100,00
Jawa Barat	5,64	93,79	0,57	100,00
Jawa Tengah	6,13	92,81	1,06	100,00
DI Yogyakarta	5,40	92,82	1,78	100,00
Jawa Timur	5,89	92,98	1,13	100,00
Banten	6,43	92,42	1,14	100,00
Bali	6,81	91,39	1,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,61	96,31	0,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	10,30	89,03	0,67	100,00
Kalimantan Barat	15,81	80,44	3,76	100,00
Kalimantan Tengah	15,98	82,81	1,21	100,00
Kalimantan Selatan	10,13	89,25	0,62	100,00
Kalimantan Timur	8,75	88,01	3,24	100,00
Sulawesi Utara	4,89	94,31	0,79	100,00
Sulawesi Tengah	6,71	91,46	1,83	100,00
Sulawesi Selatan	9,88	89,44	0,68	100,00
Sulawesi Tenggara	9,17	89,25	1,58	100,00
Gorontalo	7,34	92,42	0,24	100,00
Sulawesi Barat	15,74	82,65	1,61	100,00
Maluku	16,60	83,24	0,16	100,00
Maluku Utara	9,82	89,79	0,38	100,00
Irian Jaya Barat	9,92	85,58	4,50	100,00
Papua	8,36	89,32	2,32	100,00
Indonesia	7,00	91,90	1,10	100,00

Sumber : Susenas 2007

Lanjutan Tabel 13

Perkotaan

Provinsi	Kelompok Usia		TT	Total
	Anak	Dewasa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	5,03	92,12	2,85	100,00
Sumatera Utara	8,59	91,00	0,41	100,00
Sumatera Barat	3,94	95,23	0,83	100,00
Riau	14,24	83,93	1,83	100,00
Jambi	5,38	94,62	0,00	100,00
Sumatera Selatan	6,37	90,80	2,83	100,00
Bengkulu	4,64	95,36	0,00	100,00
Lampung	2,67	96,44	0,89	100,00
Bangka Belitung	3,47	95,43	1,10	100,00
Kepulauan Riau	17,06	82,94	0,00	100,00
DKI Jakarta	6,86	92,33	0,81	100,00
Jawa Barat	6,17	93,37	0,46	100,00
Jawa Tengah	5,69	93,96	0,36	100,00
DI Yogyakarta	4,15	94,92	0,92	100,00
Jawa Timur	4,32	94,61	1,08	100,00
Banten	6,30	93,31	0,39	100,00
Bali	7,14	89,97	2,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,77	96,00	0,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,87	87,73	0,40	100,00
Kalimantan Barat	14,93	82,74	2,33	100,00
Kalimantan Tengah	15,71	83,89	0,40	100,00
Kalimantan Selatan	10,53	89,47	0,00	100,00
Kalimantan Timur	6,27	89,71	4,02	100,00
Sulawesi Utara	1,21	97,08	1,71	100,00
Sulawesi Tengah	4,55	95,45	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	6,76	91,63	1,61	100,00
Sulawesi Tenggara	7,04	90,99	1,98	100,00
Gorontalo	18,05	81,95	0,00	100,00
Sulawesi Barat	3,95	87,48	8,58	100,00
Maluku	2,48	97,52	0,00	100,00
Maluku Utara	12,22	87,78	0,00	100,00
Irian Jaya Barat	0,47	97,40	2,13	100,00
Papua	10,90	86,25	2,85	100,00
Indonesia	6,23	92,89	0,87	100,00

Sumber : Susenas 2007

Lanjutan Tabel 13

Perdesaan

Provinsi	Kelompok Usia		TT	Total
	Anak	Dewasa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	10,27	85,36	4,36	100,00
Sumatera Utara	8,92	90,19	0,89	100,00
Sumatera Barat	8,82	89,10	2,07	100,00
Riau	12,10	86,22	1,68	100,00
Jambi	12,24	85,14	2,63	100,00
Sumatera Selatan	6,31	91,33	2,37	100,00
Bengkulu	4,97	94,69	0,35	100,00
Lampung	4,37	94,20	1,43	100,00
Bangka Belitung	8,04	91,13	0,83	100,00
Kepulauan Riau	4,61	90,78	4,61	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	4,98	94,31	0,71	100,00
Jawa Tengah	6,51	91,82	1,67	100,00
DI Yogyakarta	11,27	82,90	5,83	100,00
Jawa Timur	7,48	91,33	1,18	100,00
Banten	6,75	90,36	2,89	100,00
Bali	6,28	93,72	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,53	96,47	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	10,01	89,28	0,72	100,00
Kalimantan Barat	16,86	77,67	5,47	100,00
Kalimantan Tengah	16,11	82,29	1,59	100,00
Kalimantan Selatan	9,83	89,08	1,09	100,00
Kalimantan Timur	13,20	84,95	1,85	100,00
Sulawesi Utara	6,88	92,82	0,30	100,00
Sulawesi Tengah	7,65	89,73	2,62	100,00
Sulawesi Selatan	11,49	88,31	0,20	100,00
Sulawesi Tenggara	10,65	88,05	1,30	100,00
Gorontalo	4,94	94,77	0,29	100,00
Sulawesi Barat	18,47	81,53	0,00	100,00
Maluku	18,91	80,90	0,19	100,00
Maluku Utara	8,94	90,54	0,53	100,00
Irian Jaya Barat	28,95	61,76	9,28	100,00
Papua	7,14	90,79	2,07	100,00
Indonesia	7,74	90,93	1,33	100,00

Sumber : Susenas 2007

Tabel 14
Persentase Korban Tindak Kejahatan menurut Provinsi dan Jenis Tindak Kejahatan

Provinsi	Pencurian	Perampokan	Pembunuhan	Penipuan	Lainnya	TT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	46,09	13,23	0,00	14,88	21,77	4,03	100,00
Sumatera Utara	53,78	15,02	0,00	15,06	15,48	0,66	100,00
Sumatera Barat	56,36	13,60	0,00	9,36	19,19	1,49	100,00
Riau	63,65	11,32	0,00	9,50	13,78	1,75	100,00
Jambi	52,84	17,30	0,00	12,25	15,89	1,72	100,00
Sumatera Selatan	62,28	19,42	0,00	2,70	13,05	2,55	100,00
Bengkulu	66,50	8,24	0,00	14,12	10,93	0,22	100,00
Lampung	66,82	7,95	0,00	11,42	12,51	1,29	100,00
Bangka Belitung	50,35	20,77	0,00	17,34	10,59	0,95	100,00
Kepulauan Riau	42,15	18,65	0,00	17,34	20,96	0,90	100,00
DKI Jakarta	56,18	16,03	0,00	14,36	12,63	0,81	100,00
Jawa Barat	58,98	9,72	0,00	20,10	10,63	0,57	100,00
Jawa Tengah	50,35	6,62	0,00	25,35	16,61	1,06	100,00
DI Yogyakarta	58,25	3,59	0,00	23,19	13,18	1,78	100,00
Jawa Timur	53,20	7,37	0,00	23,96	14,34	1,13	100,00
Banten	57,85	7,53	0,00	15,63	17,85	1,14	100,00
Bali	61,98	9,45	0,00	18,70	8,08	1,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	73,44	1,19	0,00	15,54	9,75	0,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	66,15	6,81	0,00	5,63	20,75	0,67	100,00
Kalimantan Barat	54,09	16,27	0,00	12,89	13,00	3,76	100,00
Kalimantan Tengah	44,20	14,46	0,00	15,47	24,65	1,21	100,00
Kalimantan Selatan	64,28	5,25	0,00	10,00	19,85	0,62	100,00
Kalimantan Timur	42,69	18,48	0,00	18,93	16,66	3,24	100,00
Sulawesi Utara	57,17	5,37	0,00	13,52	23,14	0,79	100,00
Sulawesi Tengah	62,82	7,42	0,00	10,46	17,47	1,83	100,00
Sulawesi Selatan	64,01	9,68	0,00	7,51	18,13	0,68	100,00
Sulawesi Tenggara	58,69	9,61	0,00	7,43	22,69	1,58	100,00
Gorontalo	63,35	6,02	0,00	12,45	17,95	0,24	100,00
Sulawesi Barat	55,11	18,42	0,00	15,13	9,73	1,61	100,00
Maluku	61,03	2,37	0,00	7,59	28,85	0,16	100,00
Maluku Utara	75,69	3,31	0,00	7,16	13,46	0,38	100,00
Irian Jaya Barat	57,92	14,32	0,00	13,06	10,20	4,50	100,00
Papua	57,76	5,69	0,00	15,02	19,21	2,32	100,00
Indonesia	57,67	9,35	0,00	17,07	14,81	1,10	100,00

Sumber : Susenas 2007

Tabel 15
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Keberadaan Kejadian Konflik
Massal Tahun 2008

Provinsi	Ada kejadian Konflik Massal		Tidak ada Konflik Massal		Jumlah Desa/Kelurahan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	64	1,00	6.360	99,00	6.424	100
Sumatera Utara	140	2,43	5.627	97,57	5.767	100
Sumatera Barat	30	3,25	894	96,75	924	100
Riau	56	3,49	1.548	96,51	1.604	100
Jambi	53	4,07	1.250	95,93	1.303	100
Sumatera Selatan	27	0,88	3.052	99,12	3.079	100
Bengkulu	17	1,26	1.334	98,74	1.351	100
Lampung	37	1,58	2.302	98,42	2.339	100
Kep. Bangka Belitung	22	6,40	322	93,60	344	100
Kepulauan Riau	6	1,84	320	98,16	326	100
DKI Jakarta	8	3,00	259	97,00	267	100
Jawa Barat	270	4,60	5.601	95,40	5.871	100
Jawa Tengah	262	3,06	8.312	96,94	8.574	100
D I Yogyakarta	9	2,05	429	97,95	438	100
Jawa Timur	176	2,07	8.329	97,93	8.505	100
Banten	69	4,59	1.435	95,41	1.504	100
Bali	8	1,12	704	98,88	712	100
Nusa Tenggara Barat	56	6,13	857	93,87	913	100
Nusa Tenggara Timur	165	5,89	2.638	94,11	2.803	100
Kalimantan Barat	19	1,06	1.772	98,94	1.791	100
Kalimantan Tengah	12	0,83	1.436	99,17	1.448	100
Kalimantan Selatan	32	1,62	1.942	98,38	1.974	100
Kalimantan Timur	23	1,62	1.394	98,38	1.417	100
Sulawesi Utara	47	3,15	1.447	96,85	1.494	100
Sulawesi Tengah	56	3,32	1.630	96,68	1.686	100
Sulawesi Selatan	77	2,61	2.869	97,39	2.946	100
Sulawesi Tenggara	55	2,71	1.973	97,29	2.028	100
Gorontalo	16	2,74	568	97,26	584	100
Sulawesi Barat	8	1,49	528	98,51	536	100
Maluku	112	12,36	794	87,64	906	100
Maluku Utara	98	9,46	938	90,54	1.036	100
Papua Barat	23	1,91	1.182	98,09	1.205	100
Papua	225	6,86	3.054	93,14	3.279	100
I n d o n e s i a	2.278	3,02	73.100	96,98	75.378	100

Sumber : Podes 2008

Tabel 16
Banyaknya Kejadian Konflik Massal Selama Tahun 2008 Menurut Provinsi dan Jenis Konflik

Provinsi	Jenis Konflik Massal				
	Perkelahian antar kelompok warga	Perkelahian warga antar desa /kelurahan	Perkelahian warga dengan aparat keamanan	Perkelahian warga dengan aparat pemerintah	Perkelahian antar pelajar /mahasiswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	44	55	7	5	7
Sumatera Utara	153	78	3	1	8
Sumatera Barat	30	10	1	-	7
Riau	48	35	1	1	1
Jambi	23	30	3	-	3
Sumatera Selatan	15	9	3	-	2
Bengkulu	14	5	-	1	3
Lampung	14	16	2	3	2
Kep. Bangka Belitung	9	14	-	-	-
Kepulauan Riau	-	2	-	-	-
DKI Jakarta	6	-	-	-	7
Jawa Barat	236	150	8	1	33
Jawa Tengah	168	196	1	2	5
D I Yogyakarta	4	-	1	-	3
Jawa Timur	130	84	7	5	9
Banten	66	38	2	2	14
Bali	3	5	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	41	24	1	-	3
Nusa Tenggara Timur	141	88	10	8	9
Kalimantan Barat	16	3	1	-	-
Kalimantan Tengah	13	4	1	2	1
Kalimantan Selatan	21	14	2	1	1
Kalimantan Timur	15	1	-	-	3
Sulawesi Utara	36	25	-	-	2
Sulawesi Tengah	25	34	4	6	2
Sulawesi Selatan	69	28	5	-	3
Sulawesi Tenggara	53	38	2	2	8
Gorontalo	16	6	-	6	-
Sulawesi Barat	9	1	-	-	-
Maluku	129	74	12	13	6
Maluku Utara	62	44	10	4	4
Papua Barat	23	4	2	3	1
Papua	237	112	16	12	12
I n d o n e s i a	1.869	1.227	105	78	159

Lanjutan Tabel 16

Provinsi	Jenis Konflik Massal		Jumlah	Persentase Terhadap Nasional
	Perkelahian antar suku	Perkelahian lainnya		
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	4	6	128	3,36
Sumatera Utara	1	16	260	6,82
Sumatera Barat	1	1	50	1,31
Riau	1	13	100	2,62
Jambi	-	7	66	1,73
Sumatera Selatan	2	1	32	0,84
Bengkulu	-	-	23	0,60
Lampung	-	7	44	1,15
Kep. Bangka Belitung	1	-	24	0,63
Kepulauan Riau	1	3	6	0,16
DKI Jakarta	1	-	14	0,37
Jawa Barat	2	13	443	11,61
Jawa Tengah	1	12	385	10,09
D I Yogyakarta	2	-	10	0,26
Jawa Timur	3	30	268	7,02
Banten	1	1	124	3,25
Bali	-	-	8	0,21
Nusa Tenggara Barat	-	3	72	1,89
Nusa Tenggara Timur	11	15	282	7,39
Kalimantan Barat	-	2	22	0,58
Kalimantan Tengah	5	1	27	0,71
Kalimantan Selatan	-	3	42	1,10
Kalimantan Timur	8	11	38	1,00
Sulawesi Utara	-	-	63	1,65
Sulawesi Tengah	1	3	75	1,97
Sulawesi Selatan	1	2	108	2,83
Sulawesi Tenggara	-	4	107	2,80
Gorontalo	-	-	28	0,73
Sulawesi Barat	-	1	11	0,29
Maluku	2	18	254	6,66
Maluku Utara	-	31	155	4,06
Papua Barat	2	8	43	1,13
Papua	99	15	503	13,18
Indonesia	150	227	3.815	100,00

Sumber : Podes 2008

Tabel 17
Persentase Desa/Kelurahan menurut Provinsi dan Jenis Konflik Massal yang Paling Sering
Terjadi Selama Tahun 2008

Provinsi	Jenis Konflik Massal			
	Perkelahian antar kelompok warga	Perkelahian warga antar desa /kelurahan	Perkelahian warga dengan aparat keamanan	Perkelahian warga dengan aparat pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	34,38	48,44	4,69	1,56
Sumatera Utara	58,57	29,29	2,14	0,71
Sumatera Barat	53,33	26,67	3,33	0,00
Riau	48,21	37,50	1,79	1,79
Jambi	28,30	50,94	3,77	0,00
Sumatera Selatan	40,74	29,63	11,11	0,00
Bengkulu	58,82	23,53	0,00	5,88
Lampung	35,14	43,24	5,41	5,41
Kep. Bangka Belitung	36,36	59,09	0,00	0,00
Kepulauan Riau	0,00	33,33	0,00	0,00
DKI Jakarta	37,50	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	49,63	37,41	2,59	0,37
Jawa Tengah	37,79	56,11	0,38	0,76
D I Yogyakarta	44,44	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	44,32	34,66	1,70	1,70
Banten	46,38	39,13	1,45	1,45
Bali	37,50	62,50	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	48,21	39,29	1,79	0,00
Nusa Tenggara Timur	45,45	36,97	4,85	1,21
Kalimantan Barat	78,95	10,53	5,26	0,00
Kalimantan Tengah	33,33	25,00	0,00	16,67
Kalimantan Selatan	46,88	31,25	6,25	3,13
Kalimantan Timur	47,83	4,35	0,00	0,00
Sulawesi Utara	51,06	44,68	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	28,57	50,00	3,57	10,71
Sulawesi Selatan	59,74	27,27	5,19	0,00
Sulawesi Tenggara	47,27	36,36	3,64	3,64
Gorontalo	62,50	25,00	0,00	12,50
Sulawesi Barat	75,00	12,50	0,00	0,00
Maluku	41,96	39,29	6,25	3,57
Maluku Utara	37,76	36,73	5,10	3,06
Papua Barat	52,17	13,04	8,70	4,35
Papua	41,33	22,22	2,22	0,89
I n d o n e s i a	44,82	36,83	2,90	1,67

Lanjutan Tabel 17

Provinsi	Jenis Konflik Massal			Jumlah
	Perkelahian antar pelajar /mahasiswa	Perkelahian antar suku	Perkelahian lainnya	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	4,69	0,00	6,25	100 (64)
Sumatera Utara	2,86	0,71	5,71	100 (140)
Sumatera Barat	13,33	0,00	3,33	100 (30)
Riau	1,79	1,79	7,14	100 (56)
Jambi	5,66	0,00	11,32	100 (53)
Sumatera Selatan	7,41	7,41	3,70	100 (27)
Bengkulu	11,76	0,00	0,00	100 (17)
Lampung	5,41	0,00	5,41	100 (37)
Kep. Bangka Belitung	0,00	4,55	0,00	100 (22)
Kepulauan Riau	0,00	16,67	50,00	100 (6)
DKI Jakarta	62,50	0,00	0,00	100 (8)
Jawa Barat	5,93	0,37	3,70	100 (270)
Jawa Tengah	1,53	0,38	3,05	100 (262)
D I Yogyakarta	33,33	22,22	0,00	100 (9)
Jawa Timur	3,41	0,57	13,64	100 (176)
Banten	8,70	1,45	1,45	100 (69)
Bali	0,00	0,00	0,00	100 (8)
Nusa Tenggara Barat	5,36	0,00	5,36	100 (56)
Nusa Tenggara Timur	3,03	4,24	4,24	100 (165)
Kalimantan Barat	0,00	0,00	5,26	100 (19)
Kalimantan Tengah	8,33	8,33	8,33	100 (12)
Kalimantan Selatan	3,13	0,00	9,38	100 (32)
Kalimantan Timur	8,70	21,74	17,39	100 (23)
Sulawesi Utara	4,26	0,00	0,00	100 (47)
Sulawesi Tengah	3,57	1,79	1,79	100 (56)
Sulawesi Selatan	3,90	1,30	2,60	100 (77)
Sulawesi Tenggara	3,64	0,00	5,45	100 (55)
Gorontalo	0,00	0,00	0,00	100 (16)
Sulawesi Barat	0,00	0,00	12,50	100 (8)
Maluku	0,89	1,79	6,25	100 (112)
Maluku Utara	2,04	0,00	15,31	100 (98)
Papua Barat	4,35	8,70	8,70	100 (23)
Papua	1,33	27,11	4,89	100 (225)
I n d o n e s i a	3,91	4,04	5,84	100 (2.278)

Sumber : Podes 2008

Tabel 18
Jumlah dan Persentase Kejadian Konflik Massal Menurut Provinsi dan Penyebab Utama Selama Tahun 2008

Provinsi	Penyebab Utama Terjadinya Konflik Massal							
	Harta		Kekuasaan		Perempuan		Ideologi	
	N	%	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	8	9,41	7	8,24	12	14,12	6	7,06
Sumatera Utara	13	8,23	15	9,49	13	8,23	3	1,90
Sumatera Barat	4	11,43	1	2,86	2	5,71	0	0,00
Riau	2	3,39	1	1,69	3	5,08	1	1,69
Jambi	2	3,64	0	0,00	6	10,91	0	0,00
Sumatera Selatan	3	10,34	3	10,34	1	3,45	0	0,00
Bengkulu	2	11,76	1	5,88	4	23,53	0	0,00
Lampung	6	16,22	0	0,00	2	5,41	1	2,70
Kep. Bangka Belitung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kepulauan Riau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	0	0,00	1	11,11	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	10	3,22	7	2,25	37	11,90	11	3,54
Jawa Tengah	4	1,41	6	2,12	31	10,95	6	2,12
D I Yogyakarta	0	0,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00
Jawa Timur	5	2,55	5	2,55	19	9,69	12	6,12
Banten	0	0,00	4	5,00	14	17,50	0	0,00
Bali	0	0,00	1	12,50	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	2	3,33	2	3,33	6	10,00	2	3,33
Nusa Tenggara Timur	31	15,58	21	10,55	14	7,04	2	1,01
Kalimantan Barat	2	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Tengah	1	5,88	2	11,76	3	17,65	0	0,00
Kalimantan Selatan	3	8,82	0	0,00	1	2,94	1	2,94
Kalimantan Timur	0	0,00	0	0,00	1	4,35	5	21,74
Sulawesi Utara	4	7,55	4	7,55	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	2	3,23	1	1,61	3	4,84	1	1,61
Sulawesi Selatan	4	4,88	4	4,88	4	4,88	2	2,44
Sulawesi Tenggara	1	1,59	1	1,59	2	3,17	0	0,00
Gorontalo	1	5,56	3	16,67	0	0,00	2	11,11
Sulawesi Barat	0	0,00	1	12,50	0	0,00	0	0,00
Maluku	8	5,37	19	12,75	23	15,44	5	3,36
Maluku Utara	4	3,48	4	3,48	5	4,35	4	3,48
Papua Barat	3	11,54	3	11,54	6	23,08	0	0,00
Papua	46	13,90	49	14,80	158	47,73	11	3,32
Indonesia	171	6,43	166	6,24	371	13,94	75	2,82

Lanjutan Tabel 18

Provinsi	Penyebab Utama Terjadinya Konflik Massal						Jumlah	
	Olahraga		Keramaian		Lainnya		N	%
	N	%	N	%	N	%		
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Nanggroe Aceh Darussalam	7	8,24	11	12,94	34	40,00	85	100,00
Sumatera Utara	8	5,06	61	38,61	45	28,48	158	100,00
Sumatera Barat	0	0,00	14	40,00	14	40,00	35	100,00
Riau	3	5,08	33	55,93	16	27,12	59	100,00
Jambi	9	16,36	24	43,64	14	25,45	55	100,00
Sumatera Selatan	0	0,00	9	31,03	13	44,83	29	100,00
Bengkulu	2	11,76	4	23,53	4	23,53	17	100,00
Lampung	0	0,00	18	48,65	10	27,03	37	100,00
Kep. Bangka Belitung	2	8,70	8	34,78	13	56,52	23	100,00
Kepulauan Riau	0	0,00	2	33,33	4	66,67	6	100,00
DKI Jakarta	0	0,00	1	11,11	7	77,78	9	100,00
Jawa Barat	37	11,90	130	41,80	79	25,40	311	100,00
Jawa Tengah	13	4,59	157	55,48	66	23,32	283	100,00
D I Yogyakarta	2	20,00	1	10,00	6	60,00	10	100,00
Jawa Timur	8	4,08	89	45,41	58	29,59	196	100,00
Banten	15	18,75	26	32,50	21	26,25	80	100,00
Bali	0	0,00	0	0,00	7	87,50	8	100,00
Nusa Tenggara Barat	8	13,33	12	20,00	28	46,67	60	100,00
Nusa Tenggara Timur	11	5,53	33	16,58	87	43,72	199	100,00
Kalimantan Barat	3	15,00	5	25,00	10	50,00	20	100,00
Kalimantan Tengah	0	0,00	6	35,29	5	29,41	17	100,00
Kalimantan Selatan	2	5,88	3	8,82	24	70,59	34	100,00
Kalimantan Timur	2	8,70	6	26,09	9	39,13	23	100,00
Sulawesi Utara	4	7,55	17	32,08	24	45,28	53	100,00
Sulawesi Tengah	10	16,13	17	27,42	28	45,16	62	100,00
Sulawesi Selatan	2	2,44	27	32,93	39	47,56	82	100,00
Sulawesi Tenggara	7	11,11	34	53,97	18	28,57	63	100,00
Gorontalo	4	22,22	2	11,11	6	33,33	18	100,00
Sulawesi Barat	0	0,00	2	25,00	5	62,50	8	100,00
Maluku	15	10,07	45	30,20	34	22,82	149	100,00
Maluku Utara	6	5,22	56	48,70	36	31,30	115	100,00
Papua Barat	2	7,69	2	7,69	10	38,46	26	100,00
Papua	16	4,83	4	1,21	47	14,20	331	100,00
Indonesia	198	7,44	859	32,28	821	30,85	2.661	100,00

Sumber : Podes 2008

Tabel 19
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Konflik Massal
yang Paling Sering Terjadi dan Hasil Penyelesaian Konflik

Jenis konflik massal yang paling sering terjadi	Hasil Penyelesaian Konflik				Jumlah Desa/Kelurahan	
	Selesai		Tidak selesai		N	%
	N	%	N	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Perkelahian antar kelompok warga	959	93,93	62	6,07	1.021	100,00
2. Perkelahian warga antar desa/kelurahan	781	93,09	58	6,91	839	100,00
3. Perkelahian warga dengan aparat keamanan	59	89,39	7	10,61	66	100,00
4. Perkelahian warga dengan aparat pemerintah	33	86,84	5	13,16	38	100,00
5. Perkelahian antar pelajar/mahasiswa	80	89,89	9	10,11	89	100,00
6. Perkelahian antar suku	81	88,04	11	11,96	92	100,00
7. Perkelahian massal lainnya	107	80,45	26	19,55	133	100,00
J u m l a h	2.100	92,19	178	7,81	2.278	100,00

Sumber : Podes 2008

Tabel 20
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Konflik Massal
yang Paling Sering Terjadi dan Hasil Penyelesaian Konflik

Provinsi	Hasil Penyelesaian Konflik				Jumlah Desa/Kelurahan	
	Selesai		Tidak selesai		N	%
	N	%	N	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	61	95,31	3	4,69	64	100,00
Sumatera Utara	122	87,14	18	12,86	140	100,00
Sumatera Barat	26	86,67	4	13,33	30	100,00
Riau	50	89,29	6	10,71	56	100,00
Jambi	50	94,34	3	5,66	53	100,00
Sumatera Selatan	25	92,59	2	7,41	27	100,00
Bengkulu	16	94,12	1	5,88	17	100,00
Lampung	32	86,49	5	13,51	37	100,00
Kep. Bangka Belitung	21	95,45	1	4,55	22	100,00
Kepulauan Riau	6	100,00	-	-	6	100,00
DKI Jakarta	7	87,50	1	12,50	8	100,00
Jawa Barat	255	94,44	15	5,56	270	100,00
Jawa Tengah	247	94,27	15	5,73	262	100,00
D I Yogyakarta	8	88,89	1	11,11	9	100,00
Jawa Timur	165	93,75	11	6,25	176	100,00
Banten	68	98,55	1	1,45	69	100,00
Bali	6	75,00	2	25,00	8	100,00
Nusa Tenggara Barat	55	98,21	1	1,79	56	100,00
Nusa Tenggara Timur	140	84,85	25	15,15	165	100,00
Kalimantan Barat	16	84,21	3	15,79	19	100,00
Kalimantan Tengah	10	83,33	2	16,67	12	100,00
Kalimantan Selatan	29	90,63	3	9,38	32	100,00
Kalimantan Timur	21	91,30	2	8,70	23	100,00
Sulawesi Utara	43	91,49	4	8,51	47	100,00
Sulawesi Tengah	53	94,64	3	5,36	56	100,00
Sulawesi Selatan	73	94,81	4	5,19	77	100,00
Sulawesi Tenggara	53	96,36	2	3,64	55	100,00
Gorontalo	14	87,50	2	12,50	16	100,00
Sulawesi Barat	8	100,00	-	-	8	100,00
Maluku	101	90,18	11	9,82	112	100,00
Maluku Utara	94	95,92	4	4,08	98	100,00
Papua Barat	21	91,30	2	8,70	23	100,00
Papua	204	90,67	21	9,33	225	100,00
I n d o n e s i a	2.100	92,19	178	7,81	2.278	100,00

Sumber : Podes 2008

Tabel 21
Persentase Desa/Kelurahan yang Dapat Menyelesaikan Konflik Menurut Provinsi
dan Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi

Provinsi	Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi			
	Perkelahian antar kelompok warga	Perkelahian warga antar desa /kelurahan	Perkelahian warga dengan aparat keamanan	Perkelahian warga dengan aparat pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	95,45 (22)	100,00 (31)	66,67 (3)	100,00 (1)
Sumatera Utara	86,59 (82)	85,37 (41)	100,00 (3)	100,00 (1)
Sumatera Barat	87,50 (16)	75,00 (8)	100,00 (1)	0,00 (0)
Riau	85,19 (27)	95,24 (21)	100,00 (1)	100,00 (1)
Jambi	100,00 (15)	92,59 (27)	50,00 (2)	0,00 (0)
Sumatera Selatan	100,00 (11)	75,00 (8)	100,00 (3)	0,00 (0)
Bengkulu	100,00 (10)	75,00 (4)	0,00 (0)	100,00 (1)
Lampung	92,31 (13)	87,50 (16)	100,00 (2)	50,00 (2)
Kep. Bangka Belitung	100,00 (8)	100,00 (13)	0,00 (0)	0,00 (0)
Kepulauan Riau	0,00 (0)	100,00 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)
DKI Jakarta	100,00 (3)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
Jawa Barat	97,01 (134)	96,04 (101)	71,43 (7)	100,00 (1)
Jawa Tengah	97,98 (99)	94,56 (147)	100,00 (1)	50,00 (2)
D I Yogyakarta	100,00 (4)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)
Jawa Timur	97,44 (78)	91,80 (61)	100,00 (3)	100,00 (3)
Banten	100,00 (32)	96,30 (27)	100,00 (1)	100,00 (1)
Bali	33,33 (3)	100,00 (5)	0,00 (0)	0,00 (0)
Nusa Tenggara Barat	96,30 (27)	100,00 (22)	100,00 (1)	0,00 (0)
Nusa Tenggara Timur	85,33 (75)	90,16 (61)	62,50 (8)	100,00 (2)
Kalimantan Barat	80,00 (15)	100,00 (2)	100,00 (1)	0,00 (0)
Kalimantan Tengah	100,00 (4)	33,33 (3)	0,00 (0)	100,00 (2)
Kalimantan Selatan	93,33 (15)	80,00 (10)	100,00 (2)	100,00 (1)
Kalimantan Timur	90,91 (11)	100,00 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)
Sulawesi Utara	91,67 (24)	90,48 (21)	0,00 (0)	0,00 (0)
Sulawesi Tengah	100,00 (16)	89,29 (28)	100,00 (2)	100,00 (6)
Sulawesi Selatan	95,65 (46)	100,00 (21)	100,00 (4)	0,00 (0)
Sulawesi Tenggara	96,15 (26)	95,00 (20)	100,00 (2)	100,00 (2)
Gorontalo	90,00 (10)	100,00 (4)	0,00 (0)	50,00 (2)
Sulawesi Barat	100,00 (6)	100,00 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)
Maluku	95,74 (47)	90,91 (44)	100,00 (7)	75,00 (4)
Maluku Utara	100,00 (37)	97,22 (36)	100,00 (5)	100,00 (3)
Papua Barat	100,00 (12)	66,67 (3)	100,00 (2)	0,00 (1)
Papua	91,40 (93)	96,00 (50)	100,00 (5)	100,00 (2)
I n d o n e s i a	93,93 (1.021)	93,09 (839)	89,39 (66)	86,84 (38)

Lanjutan Tabel 21

Provinsi	Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi			Jumlah Desa/Kel. yang mengalami Konflik Massal
	Perkelahian antar pelajar /mahasiswa	Perkelahian antar suku	Perkelahian lainnya	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	66,67 (3)	0,00 (0)	100,00 (4)	95,31 (64)
Sumatera Utara	100,00 (4)	0,00 (1)	100,00 (8)	87,14 (140)
Sumatera Barat	100,00 (4)	0,00 (0)	100,00 (1)	86,67 (30)
Riau	100,00 (1)	100,00 (1)	75,00 (4)	89,29 (56)
Jambi	100,00 (3)	0,00 (0)	100,00 (6)	94,34 (53)
Sumatera Selatan	100,00 (2)	100,00 (2)	100,00 (1)	92,59 (27)
Bengkulu	100,00 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)	94,12 (17)
Lampung	100,00 (2)	0,00 (0)	50,00 (2)	86,49 (37)
Kep. Bangka Belitung	0,00 (0)	0,00 (1)	0,00 (0)	95,45 (22)
Kepulauan Riau	0,00 (0)	100,00 (1)	100,00 (3)	100,00 (6)
DKI Jakarta	80,00 (5)	0,00 (0)	0,00 (0)	87,50 (8)
Jawa Barat	87,50 (16)	100,00 (1)	70,00 (10)	94,44 (270)
Jawa Tengah	75,00 (4)	0,00 (1)	75,00 (8)	94,27 (262)
D I Yogyakarta	66,67 (3)	100,00 (2)	0,00 (0)	88,89 (9)
Jawa Timur	100,00 (6)	100,00 (1)	83,33 (24)	93,75 (176)
Banten	100,00 (6)	100,00 (1)	100,00 (1)	98,55 (69)
Bali	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	75,00 (8)
Nusa Tenggara Barat	100,00 (3)	0,00 (0)	100,00 (3)	98,21 (56)
Nusa Tenggara Timur	100,00 (5)	71,43 (7)	57,14 (7)	84,85 (165)
Kalimantan Barat	0,00 (0)	0,00 (0)	100,00 (1)	84,21 (19)
Kalimantan Tengah	100,00 (1)	100,00 (1)	100,00 (1)	83,33 (12)
Kalimantan Selatan	100,00 (1)	0,00 (0)	100,00 (3)	90,63 (32)
Kalimantan Timur	50,00 (2)	100,00 (5)	100,00 (4)	91,30 (23)
Sulawesi Utara	100,00 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)	91,49 (47)
Sulawesi Tengah	100,00 (2)	100,00 (1)	100,00 (1)	94,64 (56)
Sulawesi Selatan	100,00 (3)	100,00 (1)	0,00 (2)	94,81 (77)
Sulawesi Tenggara	100,00 (2)	0,00 (0)	100,00 (3)	96,36 (55)
Gorontalo	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)	87,50 (16)
Sulawesi Barat	0,00 (0)	0,00 (0)	100,00 (1)	100,00 (8)
Maluku	100,00 (1)	50,00 (2)	57,14 (7)	90,18 (112)
Maluku Utara	100,00 (2)	0,00 (0)	80,00 (15)	95,92 (98)
Papua Barat	100,00 (1)	100,00 (2)	100,00 (2)	91,30 (23)
Papua	33,33 (3)	91,80 (61)	63,64 (11)	90,67 (225)
I n d o n e s i a	89,89 (89)	88,04 (92)	80,45 (133)	92,19 (2.278)

Sumber : Podes 2008

Tabel 22
Persentase dan Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami
Konflik Massal Menurut Provinsi dan Cara Penyelesaian Konflik

Provinsi	Cara Penyelesaian Konflik				Jumlah Desa/Kelurahan	
	Tanpa Inisiator		Melibatkan Inisiator		N	%
	N	%	N	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	2	3,13	62	96,88	64	100,00
Sumatera Utara	1	0,71	139	99,29	140	100,00
Sumatera Barat	0	0,00	30	100,00	30	100,00
Riau	0	0,00	56	100,00	56	100,00
Jambi	1	1,89	52	98,11	53	100,00
Sumatera Selatan	0	0,00	27	100,00	27	100,00
Bengkulu	0	0,00	17	100,00	17	100,00
Lampung	1	2,70	36	97,30	37	100,00
Kep. Bangka Belitung	0	0,00	22	100,00	22	100,00
Kepulauan Riau	0	0,00	6	100,00	6	100,00
DKI Jakarta	0	0,00	8	100,00	8	100,00
Jawa Barat	3	1,11	267	98,89	270	100,00
Jawa Tengah	3	1,15	259	98,85	262	100,00
D I Yogyakarta	1	11,11	8	88,89	9	100,00
Jawa Timur	6	3,41	170	96,59	176	100,00
Banten	1	1,45	68	98,55	69	100,00
Bali	0	0,00	8	100,00	8	100,00
Nusa Tenggara Barat	0	0,00	56	100,00	56	100,00
Nusa Tenggara Timur	6	3,64	159	96,36	165	100,00
Kalimantan Barat	2	10,53	17	89,47	19	100,00
Kalimantan Tengah	1	8,33	11	91,67	12	100,00
Kalimantan Selatan	0	0,00	32	100,00	32	100,00
Kalimantan Timur	0	0,00	23	100,00	23	100,00
Sulawesi Utara	1	2,13	46	97,87	47	100,00
Sulawesi Tengah	0	0,00	56	100,00	56	100,00
Sulawesi Selatan	0	0,00	77	100,00	77	100,00
Sulawesi Tenggara	0	0,00	55	100,00	55	100,00
Gorontalo	0	0,00	16	100,00	16	100,00
Sulawesi Barat	0	0,00	8	100,00	8	100,00
Maluku	5	4,46	107	95,54	112	100,00
Maluku Utara	0	0,00	98	100,00	98	100,00
Papua Barat	0	0,00	23	100,00	23	100,00
Papua	6	2,67	219	97,33	225	100,00
Indonesia	40	1,76	2.238	98,24	2.278	100,00

Tabel 23
Persentase Desa/Kelurahan menurut Provinsi dan Inisiator
/Mediator yang Dilibatkan Dalam Upaya Penyelesaian Konflik

Provinsi	Inisiator/Mediator yang Dilibatkan dalam Penyelesaian Konflik					
	Tokoh Masyarakat		Tokoh Agama		Aparat Pemerintah	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	50	80,65	17	27,42	16	25,81
Sumatera Utara	90	64,75	52	37,41	78	56,12
Sumatera Barat	19	63,33	8	26,67	17	56,67
Riau	34	60,71	16	28,57	30	53,57
Jambi	43	82,69	22	42,31	24	46,15
Sumatera Selatan	11	40,74	6	22,22	22	81,48
Bengkulu	10	58,82	4	23,53	7	41,18
Lampung	20	55,56	4	11,11	24	66,67
Kep. Bangka Belitung	15	68,18	12	54,55	15	68,18
Kepulauan Riau	1	16,67	0	0,00	4	66,67
DKI Jakarta	4	50,00	2	25,00	3	37,50
Jawa Barat	141	52,81	75	28,09	202	75,66
Jawa Tengah	124	47,88	40	15,44	148	57,14
D I Yogyakarta	3	37,50	2	25,00	6	75,00
Jawa Timur	69	40,59	18	10,59	91	53,53
Banten	48	70,59	19	27,94	46	67,65
Bali	5	62,50	1	12,50	5	62,50
Nusa Tenggara Barat	36	64,29	19	33,93	42	75,00
Nusa Tenggara Timur	78	49,06	39	24,53	100	62,89
Kalimantan Barat	13	76,47	2	11,76	8	47,06
Kalimantan Tengah	7	63,64	0	0,00	4	36,36
Kalimantan Selatan	21	65,63	5	15,63	17	53,13
Kalimantan Timur	13	56,52	5	21,74	13	56,52
Sulawesi Utara	13	28,26	12	26,09	28	60,87
Sulawesi Tengah	26	46,43	13	23,21	38	67,86
Sulawesi Selatan	34	44,16	16	20,78	41	53,25
Sulawesi Tenggara	25	45,45	8	14,55	28	50,91
Gorontalo	8	50,00	3	18,75	9	56,25
Sulawesi Barat	5	62,50	1	12,50	4	50,00
Maluku	72	67,29	40	37,38	67	62,62
Maluku Utara	46	46,94	22	22,45	52	53,06
Papua Barat	17	73,91	8	34,78	8	34,78
Papua	127	57,99	88	40,18	130	59,36
I n d o n e s i a	1.228	54,87	579	25,87	1.327	59,29

Lanjutan Tabel 23

Provinsi	Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Konflik			
	Aparat Keamanan		Lainnya	
	N	%	N	%
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Darussalam	20	32,26	2	3,23
Sumatera Utara	62	44,60	10	7,19
Sumatera Barat	19	63,33	2	6,67
Riau	24	42,86	2	3,57
Jambi	32	61,54	2	3,85
Sumatera Selatan	10	37,04	1	3,70
Bengkulu	8	47,06	1	5,88
Lampung	21	58,33	4	11,11
Kep. Bangka Belitung	21	95,45	1	4,55
Kepulauan Riau	3	50,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	75,00	1	12,50
Jawa Barat	172	64,42	14	5,24
Jawa Tengah	156	60,23	11	4,25
D I Yogyakarta	7	87,50	3	37,50
Jawa Timur	102	60,00	12	7,06
Banten	46	67,65	6	8,82
Bali	8	100,00	1	12,50
Nusa Tenggara Barat	42	75,00	3	5,36
Nusa Tenggara Timur	89	55,97	7	4,40
Kalimantan Barat	11	64,71	2	11,76
Kalimantan Tengah	4	36,36	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	40,63	3	9,38
Kalimantan Timur	12	52,17	2	8,70
Sulawesi Utara	20	43,48	3	6,52
Sulawesi Tengah	38	67,86	4	7,14
Sulawesi Selatan	59	76,62	2	2,60
Sulawesi Tenggara	38	69,09	3	5,45
Gorontalo	10	62,50	1	6,25
Sulawesi Barat	5	62,50	0	0,00
Maluku	56	52,34	7	6,54
Maluku Utara	44	44,90	2	2,04
Papua Barat	7	30,43	3	13,04
Papua	66	30,14	5	2,28
Indonesia	1.231	55,00	120	5,36

Sumber : Podes 2008

Tabel 24
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi, Cara Penyelesaian Konflik dan Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Konflik

Jenis konflik massal yang paling sering terjadi	Cara Penyelesaian Konflik		Inisiator/Mediator yang Dilibatkan Dalam Penyelesaian Konflik				
	Tanpa Inisiator	Melibatkan Inisiator	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Aparat Pemerintah	Aparat Keamanan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Perkelahian antar kelompok warga	11	1.010	571	261	585	527	47
2. Perkelahian warga antar desa/kelurahan	12	827	473	223	515	502	36
3. Perkelahian warga dengan aparat keamanan	1	65	33	13	35	46	5
4. Perkelahian warga dengan aparat pemerintah	1	37	15	8	18	22	4
5. Perkelahian antar pelajar/mahasiswa	3	86	30	13	42	49	17
6. Perkelahian antar suku	4	88	48	36	62	35	2
7. Perkelahian massal lainnya	8	125	58	25	70	50	9
J u m l a h	40	2.238	1.228	579	1.327	1.231	120

Sumber : Podes 2008

Tabel 25
Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Konflik Menurut Provinsi, Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi dan Hasil Penyelesaian

Provinsi	Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi							
	Perkelahian antar kelompok warga		Perkelahian warga antar desa /kelurahan		Perkelahian warga dengan aparat keamanan		Perkelahian warga dengan aparat pemerintah	
	Total	Selesai	Total	Selesai	Total	Selesai	Total	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	22	21	31	31	3	2	1	1
Sumatera Utara	82	71	41	35	3	3	1	1
Sumatera Barat	16	14	8	6	1	1	0	0
Riau	27	23	21	20	1	1	1	1
Jambi	15	15	27	25	2	1	0	0
Sumatera Selatan	11	11	8	6	3	3	0	0
Bengkulu	10	10	4	3	0	0	1	1
Lampung	13	12	16	14	2	2	2	1
Kep. Bangka Belitung	8	8	13	13	0	0	0	0
Kepulauan Riau	0	0	2	2	0	0	0	0
DKI Jakarta	3	3	0	0	0	0	0	0
Jawa Barat	134	130	101	97	7	5	1	1
Jawa Tengah	99	97	147	139	1	1	2	1
D I Yogyakarta	4	4	0	0	0	0	0	0
Jawa Timur	78	76	61	56	3	3	3	3
Banten	32	32	27	26	1	1	1	1
Bali	3	1	5	5	0	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	27	26	22	22	1	1	0	0
Nusa Tenggara Timur	75	64	61	55	8	5	2	2
Kalimantan Barat	15	12	2	2	1	1	0	0
Kalimantan Tengah	4	4	3	1	0	0	2	2
Kalimantan Selatan	15	14	10	8	2	2	1	1
Kalimantan Timur	11	10	1	1	0	0	0	0
Sulawesi Utara	24	22	21	19	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	16	16	28	25	2	2	6	6
Sulawesi Selatan	46	44	21	21	4	4	0	0
Sulawesi Tenggara	26	25	20	19	2	2	2	2
Gorontalo	10	9	4	4	0	0	2	1
Sulawesi Barat	6	6	1	1	0	0	0	0
Maluku	47	45	44	40	7	7	4	3
Maluku Utara	37	37	36	35	5	5	3	3
Papua Barat	12	12	3	2	2	2	1	0
Papua	93	85	50	48	5	5	2	2
I n d o n e s i a	1.021	959	839	781	66	59	38	33

Lanjutan Tabel 25

Provinsi	Jenis Konflik Massal yang Paling Sering Terjadi						Jumlah Desa/Kel. yang mengalami Konflik Massal	
	Perkelahian antar pelajar /mahasiswa		Perkelahian antar suku		Perkelahian lainnya		Total	Selesai
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	3	2	0	0	4	4	64	61
Sumatera Utara	4	4	1	0	8	8	140	122
Sumatera Barat	4	4	0	0	1	1	30	26
Riau	1	1	1	1	4	3	56	50
Jambi	3	3	0	0	6	6	53	50
Sumatera Selatan	2	2	2	2	1	1	27	25
Bengkulu	2	2	0	0	0	0	17	16
Lampung	2	2	0	0	2	1	37	32
Kep. Bangka Belitung	0	0	1	0	0	0	22	21
Kepulauan Riau	0	0	1	1	3	3	6	6
DKI Jakarta	5	4	0	0	0	0	8	7
Jawa Barat	16	14	1	1	10	7	270	255
Jawa Tengah	4	3	1	0	8	6	262	247
D I Yogyakarta	3	2	2	2	0	0	9	8
Jawa Timur	6	6	1	1	24	20	176	165
Banten	6	6	1	1	1	1	69	68
Bali	0	0	0	0	0	0	8	6
Nusa Tenggara Barat	3	3	0	0	3	3	56	55
Nusa Tenggara Timur	5	5	7	5	7	4	165	140
Kalimantan Barat	0	0	0	0	1	1	19	16
Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	1	12	10
Kalimantan Selatan	1	1	0	0	3	3	32	29
Kalimantan Timur	2	1	5	5	4	4	23	21
Sulawesi Utara	2	2	0	0	0	0	47	43
Sulawesi Tengah	2	2	1	1	1	1	56	53
Sulawesi Selatan	3	3	1	1	2	0	77	73
Sulawesi Tenggara	2	2	0	0	3	3	55	53
Gorontalo	0	0	0	0	0	0	16	14
Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	1	8	8
Maluku	1	1	2	1	7	4	112	101
Maluku Utara	2	2	0	0	15	12	98	94
Papua Barat	1	1	2	2	2	2	23	21
Papua	3	1	61	56	11	7	225	204
Indonesia	89	80	92	81	133	107	2.278	2.100

Sumber : Podes 2008